

Bagian Kesatu Informasi Umum



1. Profil Pengurus Perusahaan

• DIREKSI



Ai Suherlan, Direktur Utama

Lahir di Tasikmalaya 10 Desember tahun 1969, Alumni Fakultas Ekonomi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1999. Pengalaman dalam dunia perbankan ditekuninya sejak tahun 1991 sebagai Staff di LPK Kasemen Kabupaten Serang. Bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sebelum menjabat Direktur Utama PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), beliau juga pernah menjadi Direktur Utama PD BPR LPK Serang dan Direktur Pemasaran Hasil Merger PD BPR Serang.

Uus Mustaudie, Direktur Operasional

Lahir di Serang tanggal 29 Juni 1967, Lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Terbuka Tahun 2003, sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional di PT. BPR Kerta Raharja Gemilang beliau memulai karir di LPK Cinangka sebagai staff Tahun 1990, Kredit tahun 1992, Direktur Tahun 1998, Direktur Utama di PD BPR LPK Cinangka pada tahun 2000 dan menjadi Kepala Cabang PD BPR Serang pasca Merger pada tahun 2008, kemudian bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sejak tahun 2011 sampai sekarang.



Deni Setia Wahyudi, Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

Lahir di Serang tanggal 1 April 1973, Lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Mathlaul Anwar Pandeglang Tahun 2006, sebelum menjabat sebagai Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan di PT. BPR Kerta Raharja Gemilang beliau memulai karir di PD. BPR LPK Anyar sebagai staff Kredit Tahun 2002, menjabat sebagai Direktur Operasional di PD BPR LPK Anyar pada tahun 2009 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Cinangka PD BPR Serang pada tahun 2018, kemudian bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sejak tahun 2018 sampai sekarang.

• KOMISARIS



Drs. Yusuf Herawan, Komisaris Utama

Lahir di Sengkong, 10 November 1962. Menempuh pendidikan S1 di Institut Ilmu Pemerintahan pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Drs. Dari Tahun 1994 sampai dengan sekarang beliau berkecimpung di bidang pemerintahan dengan jabatan terakhir beliau sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Menjadi Komisaris utama PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tanggal 21 Desember 2021.

Beni Subarsyah, Komisaris Independent

Lahir di Bandung, 14 Februari 1964. Menempuh pendidikan S1 di STIE PASIM Jurusan Manajemen pada Tahun 2007 dan mendapatkan gelar S2 di STM-IMNI pada tahun 2010. Tahun 1993-2003 bekerja sebagai Staff Operasional PD. BPR Ciwidey, tahun 2003-2010 bekerja di PD. BPR Soreang, tahun 2010-2015 bekerja di PD. BPR Kab, Bandung, tahun 2015-2021 bekerja di PT. BPR Kerta Raharja dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan. Bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tahun 2022 sebagai komisaris Independent.



Bangbang Purnawan, Komisaris Independent

Lahir di Bandung Tahun 1967. Menempuh pendidikan S1 di ITB Bandung dan mendapat gelar S2 Manajemen di IKOPIN. Tahun 1994-2000 bekerja Bank Muamalat. Tahun 2000-2011 bekerja di PT. PNM (Persero), Tahun 2012-2019 bekerja sebagai Credit Risk Manager BPR-LKM Lending Head BPR Planning&Control Head Bank Oke Indonesia d/h Bank Andara. Juli 2020 bekerja sebagai Internal Audit di PT. Hariarta Sedana dan efektif 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris. November 2021 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris Independent PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).



• PEJABAT EKSEKUTIF



Fristy Lestari,
Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Irfan Hilmi H.,
Kepala Satuan Kerja
Kepatuhan dan Manajemen Risiko



Denny Kristiyanto,
Kepala Bagian SDM dan Umum



Ashadi Ruswandi,
Kepala Bagian Operasional



Natalia Tri Rahayu,
Kepala Bagian Akuntansi &
Teknologi Informasi



Ahmad Firdaus,
Kepala Kantor Pusat Operasional

• PEJABAT EKSEKUTIF



Rochaidin,
Kepala Kantor Cabang Kelapa Dua



Abdul Ghani,
Kepala Kantor Cabang Balaraja



Dewi Sulastri,
Kepala Kantor Cabang Pasar Kemis



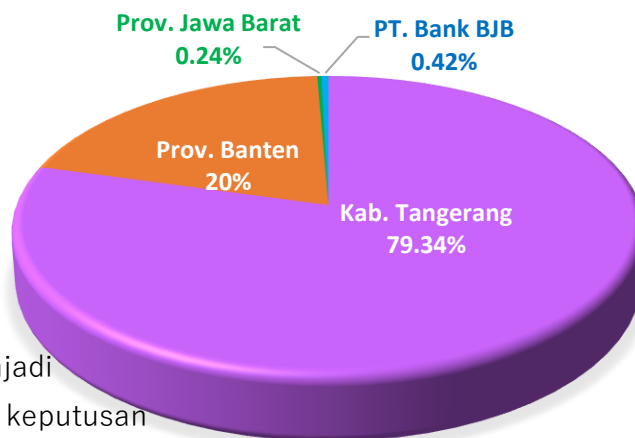
Eka Ratna Juwita,
Kepala Kantor Cabang Tigaraksa



Taufik Firdaus,
Kepala Kantor Cabang Serang

2. Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementrian Hukum dan Ham dengan nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Perseroda, bahwa komposisi kepemilikan modal disetor adalah sebagai berikut :



dalam ribuan rupiah

PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR SETELAH PERUBAHAN		MODAL DISETOR		MODAL BELUM DI SETOR
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
Pemerintah Kab. Tangerang	198,350,000	79.34%	55,000,000	76.76%	143,350,000
Pemerintah Prov. Banten	50,000,000	20.00%	15,000,000	20.94%	35,000,000
Pemerintah Prov. Jawa Barat	600,000	0.24%	600,000	0.84%	-
PT. Bank BJB	1,050,000	0.42%	1,050,000	1.47%	-
Jumlah	250,000,000	100.00%	71,650,000	100.00%	178,350,000

3. Perkembangan Usaha

3.1. Riwayat Singkat

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kerta Raharja didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah mendapat izin operasional dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/3/Kep.GBI/DpG/2008, tanggal 22 Januari 2008 serta mulai melaksanakan kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008.

Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Raharja merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR Kerta Raharja berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Pada Tahun 2019 PD. BPR Kerta Raharja melakukan perubahan Badan Hukum menjadi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan telah mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor KEP-22/KR.01/2021 Tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Badan Hukum PD Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja menjadi PT. Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

3.2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam ribuan rupiah

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan Operasional	91,096,180	84,400,701	7.93%
Beban Operasional	78,935,733	74,334,034	6.19%
Pendapatan Non Operasional	521,847	192,849	170.60%
Beban Non Operasional	447,802	508,673	-11.97%
Laba Sebelum Pajak	12,234,492	9,750,844	25.47%
Taksiran Pajak Penghasilan	2,691,588	2,145,185	25.47%
Laba Setelah Pajak	9,542,904	7,605,658	25.47%

3.3. Rasio-Rasio Keuangan

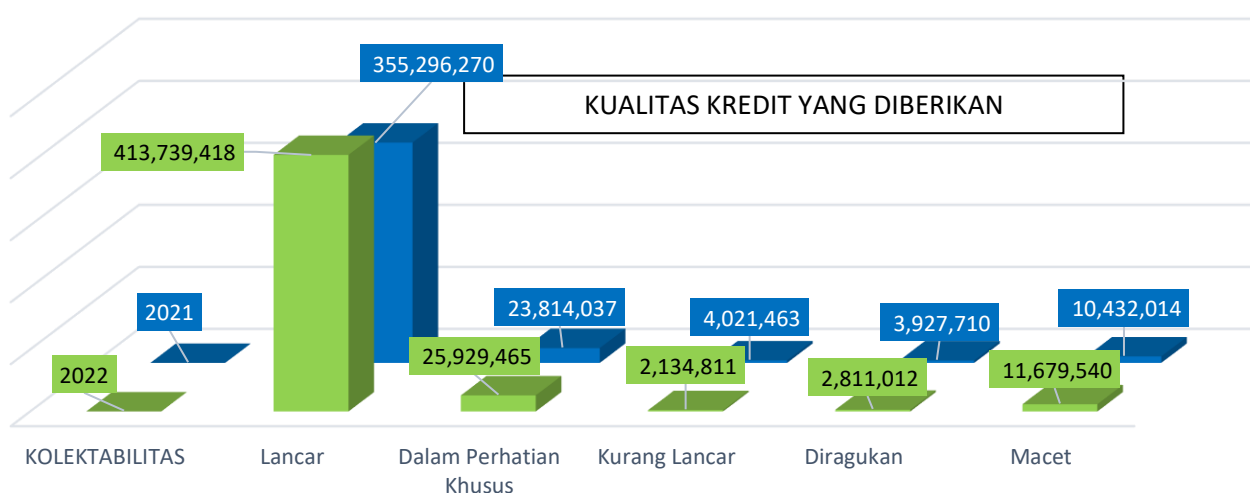
Rasio Keuangan	2022	2021
KPMM Tier 1	24.06%	22.82%
KPMM Tier 2	23.83%	22.42%
KAP	2.55%	2.93%
NPL NETT	1.80%	1.72%
ROA	2.22%	1.90%
ROE	9.26%	7.56%
NIM	9.70%	9.54%
BOPO	86.65%	89.73%
CASH RATIO	63.29%	75.36%
LDR	86.12%	82.70%

3.4. Non Performing Loan

3.4.1. Jumlah dan Prosentase NPL

dalam ribuan rupiah

KUALITAS KREDIT	2022		2021	
	Rp.	%	Rp.	%
Lancar	413,739,418	90.67%	355,296,270	89.38%
Dalam Perhatian Khusus	25,929,465	5.68%	23,814,037	5.99%
Kurang Lancar	2,134,811	0.47%	4,021,463	1.01%
Diragukan	2,811,012	0.62%	3,927,710	0.99%
Macet	11,679,540	2.56%	10,432,014	2.62%
Jumlah Kredit Yang Diberikan	456,294,246	100%	397,491,493	100%
Jumlah NPL	16,625,363	3.64%	18,381,187	4.62%



3.4.2. Penyebab utama terjadinya NPL

- Produk Kredit Multiguna; terjadinya NPL pada produk kredit Multiguna berupa kredit konsumtif kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), pada umumnya disebabkan oleh :
 - Persaingan dengan Bank Umum;
 - Adanya pegawai ASN yang memilih untuk pensiun dini;
 - Pemberhentian pegawai yang diakibatkan tersangkut perkara pidana;
 - Indisipliner pegawai yang mengakibatkan penurunan jabatan dan/atau pengurangan penghasilan;
 - Perpindahan tugas pegawai ke luar daerah.
- Produk Kredit Penghasilan Tetap; terjadinya NPL pada produk kredit yang diberikan kepada para pegawai tetap, karyawan swasta, buruh, dsb pada umumnya disebabkan oleh :
 - Pemberhentian hubungan kerja (PHK);
 - Berhenti bekerja karena alasan lainnya;

3. Pindah alamat yang tidak diketahui.
- c. Produk Kredit Multi Usaha; terjadinya NPL pada kredit produktif yang diberikan kepada para usaha mikro dan kecil, disebabkan oleh :
 1. Usaha yang terhenti disebabkan oleh berbagai faktor;
 2. Omzet usaha yang berkurang karena persaingan usaha, dsb;
 3. Pelanggan yang tidak menepati janji pembayaran;
 4. Musibah keluarga sakit, dsb;

3.4.3. Perkembangan Usaha BPR

Pada tahun 2022 tidak terdapat perluasan jaringan kantor cabang maupun kantor kas. BPR melakukan aktifitas operasional dengan Mobil Kas Keliling yang telah beroperasi sejak bulan Juni 2022.

4 Strategi dan Kebijakan Manajemen

4.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 bertujuan untuk memelihara pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik, antara lain meliputi :

- 1) Perubahan struktur organisasi untuk mengantisipasi perkembangan usaha dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perluasan jaringan pelayanan dengan pengadaan mobil kas keliling;
- 3) Peningkatan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan komposisi sumber dana pihak ketiga;
- 5) Pemeliharaan nasabah yang menjadi pangsa pasar utama (*captive market*) bidang perkreditan;
- 6) Peningkatan kegiatan promosi dan edukasi nasabah;
- 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

4.2. Penerapan Tata Kelola

3.2.1. Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu :

- 1.1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 1.2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- 1.3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- 1.4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 1.5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Pelaksanaan Tata Kelola

a. Landasan Hukum

Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang berpedoman pada:

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
3. Peraturan Direksi Nomor 03/PDIR/BPR-KRG/IX/2021 Tentang Standar Dan Prosedur Kepatuhan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

b. Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola Meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - 1.1. Jumlah dan komposisi anggota Direksi
 - a. Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
 - b. Susunan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan.
 - c. Setiap anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi, sebagaimana berikut :

No	Nama	Nomor Sertifikat	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Masa Jabatan
1	Ai Suherlan	Direktur Utama	KEU 005 2620 2018	19 Okt 2018	Tahun 2019-2024
2	Uus Mustaudie	Direktur Operasional	KEU 005 2448 2018	31 Agust 2018	Tahun 2019-2024
3	Deni Setia Wahyudi	Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan	KEU 005 2335 2018	31 Agust 2018	Tahun 2022-2027

- d. Jumlah Direksi BPR saat ini sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 08 Mei 2018 dan tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-593/KR.0113/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Laporan Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- e. Direksi dan dengan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- f. Direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan lain.

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Nama Perusahaan
1	Ai Suherlan	Direktur Utama	Tidak ada	-
2.	Uus Mustaudi	Direktur Operasional	Tidak ada	-
3.	Deni Setia Wahyudi	Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan	Tidak ada	-

1.2. Tugas dan tanggung jawab Direksi

- a. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab anggota Direksi.
- b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.
- d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.

- e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.
 - f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.
 - g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris
- 2.1. Jumlah dan komposisi Komisaris
- a. Berdasarkan POJK Nomer 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 24 ayat (1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Pada tahun 2021 ini Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang.
 - b. Komisaris diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
 - c. Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 25 ayat (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen
 - d. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris. BPR telah memiliki 2 (Dua) Komisaris Independen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 15 September 2022, sehingga saat ini jumlah Komisaris Independen sudah terpenuhi.
 - e. Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

No	Nama	Jabatan	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1.	Yusuf Herawan	Komisaris Utama	KEU 005 1444 2021	25 Oktober 2021
2.	Bangbang Purnawan	Komisaris Independent	KEU 005 3715 2019	25 Maret 2019
3.	Beni Subarsyah	Komisaris Independent	KEU 005 1646 2021	25 Oktober 2021

f. Komisaris dan dengan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.2. Tugas dan tanggungjawab Komisaris

- a. Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d. Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Komisaris telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.
- f. Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya.
- g. Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada

ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Sesuai dengan Pasal 32 POJK Tata Kelola bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite, yaitu:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Pemantau Risiko.

Saat ini PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang tertuang pada Peraturan Direksi Nomor 13a/PDIR/BPR-KRG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Tugas dari Komite Audit adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris terkait dengan audit intern dan eksternal.

Tugas dari Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

4. Penanganan benturan kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari, jajaran pengurus berkomitmen penuh bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keputusan yang harus tetap diambil maka keputusan yang diambil tetap akan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan diantaranya adalah:

- a. BPR memiliki ketentuan intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 07/PDIR/BPR-KRG/VI/2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
 - b. Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam hal terdapat keputusan yang mengandung benturan kepentingan. (dirapatkan oleh Direksi dan Komisaris.
 - c. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian suku bunga.
 - d. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara membandingkan dari beberapa penawaran dari penyedia barang dan jasa.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal
- 5.1. Fungsi Kepatuhan
- a. Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan menjalankan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - b. BPR telah membentuk Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT untuk membantu Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan.
 - c. Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT mensosialisasikan ketentuan intern dan ektern pada setiap unit kerja yang berkaitan.
 - d. Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada OJK dan Komisaris.

- e. Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

5.2. Fungsi Audit Internal

- a. BPR telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama.
- b. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Pedoman Operasional Audit Intern, Internal Audit Charter, Ketentuan Intern BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- d. SKAI dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus sesuai dengan program kerja audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris.
- e. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- f. SKAI telah melaksanakan program kerja audit secara efektif dan efisien.

5.3. Fungsi Audit Eksternal

- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- b. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- c. Berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan Nomor 00013/3.0410/AU.2/07/1624-1/1/III/2023, pada tanggal 06 Maret 2023 bahwa hasil audit adalah laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

6. Penerapan Manajemen Resiko dan pengendalian intern

6.1. Pengawasan aktif, Komisaris dan Direksi

- a. Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Pengawas dapat dibantu oleh Audit Intern.
- b. Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
- c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank

secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap semester.

- 6.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - b. Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur.
 - c. Telah merancang kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
 - d. BPR sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
 - e. BPR telah menetapkan limit risiko untuk setiap jenis resiko.
 - f. Memastikan bahwa otorisasi limit-limit telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.
- 6.3. Cakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko
 - a. Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional telah akurat dan tepat.
 - b. Memberikan perhatian yang lebih pada potensi risiko yang dinilai tinggi pada aktivitas Bank seperti kegiatan operasional dan perkreditan.
- 6.4. Sistem pengendalian Internal
 - a. Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia dan melengkapi wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh pegawai.
 - b. SKAI melakukan pemeriksaan secara berkala dan insidental terhadap pelaksanaan tugas tiap unit kerja.

- c. Pengawasan aktif dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerjanya.
- d. Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko pada Dewan Pengawas setiap semester.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- a. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b. Bank telah mendata pihak terkait beserta keluarganya.
- c. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
- d. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- e. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
- f. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2022 sebagaimana tabel berikut:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (ribuan rupiah)
1	Pihak terkait	14	2.326.110
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	9.084.565
	b. Grup	3	13.479.167
Jumlah		42	24.889.842

4.3. Kebijakan Manajemen Risiko

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka sampai dengan periode 31 Desember 2022 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membentuk Komite Pemantau Risiko yaitu struktur organisasi di tingkat Komisaris yang terkait penerapan manajemen risiko, yang berfungsi membantu tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait penerapan manajemen risiko.

2. Membentuk struktur organisasi di tingkat Operasional yang terkait penerapan manajemen risiko, meliputi ;
 - a. Komite Manajemen Risiko yaitu unit yang tidak bersifat struktural yang berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, dengan keanggotaan :
 - i. Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan
 - ii. Direktur Operasional
 - iii. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
 - iv. Pejabat eksekutif lainnya pada KPNO.
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala. Dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Manajemen risiko digabung dengan fungsi Kepatuhan dan APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).
3. Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko, meliputi :
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan limit risiko;
 - c. Kecukupan proses dan sistem manajemen risiko;
 - d. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh; dan
 - e. Penerapan manajemen risiko dalam rangka menetapkan produk dan aktifitas baru.
 - f. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal, meliputi :
 - a. Mengikutsertakan Pejabat Eksekutif untuk mengikuti Sertifikasi Direksi Level 1 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebanyak 6 orang.
 - b. Memasukkan materi manajemen risiko setiap pelatihan internal meliputi pelatihan pemasaran kredit, supervisi kredit, pemasaran dana dan jasa, akuntansi, kepegawaian dan umum.

5 Laporan Manajemen

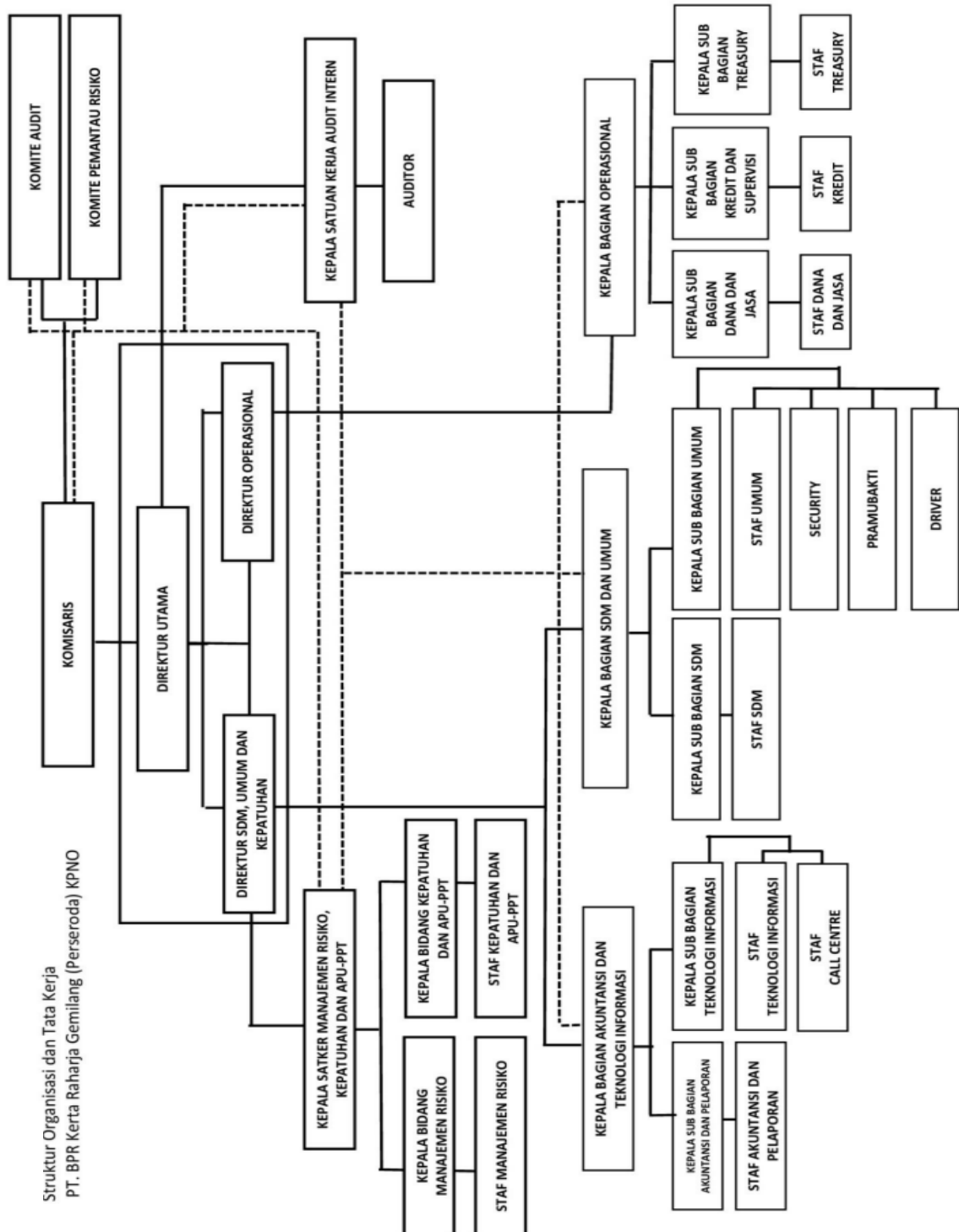
5.1. Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dan segenap manajemen Perusahaan. Komisaris juga telah memberikan pandangannya serta menyampaikan sarannya terkait implementasi strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada Tahun 2022 dalam menjalankan tugas-tugasnya Komisaris dibantu sejumlah komite di bawah Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantauan Resiko. Komisaris menilai bahwa setiap komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

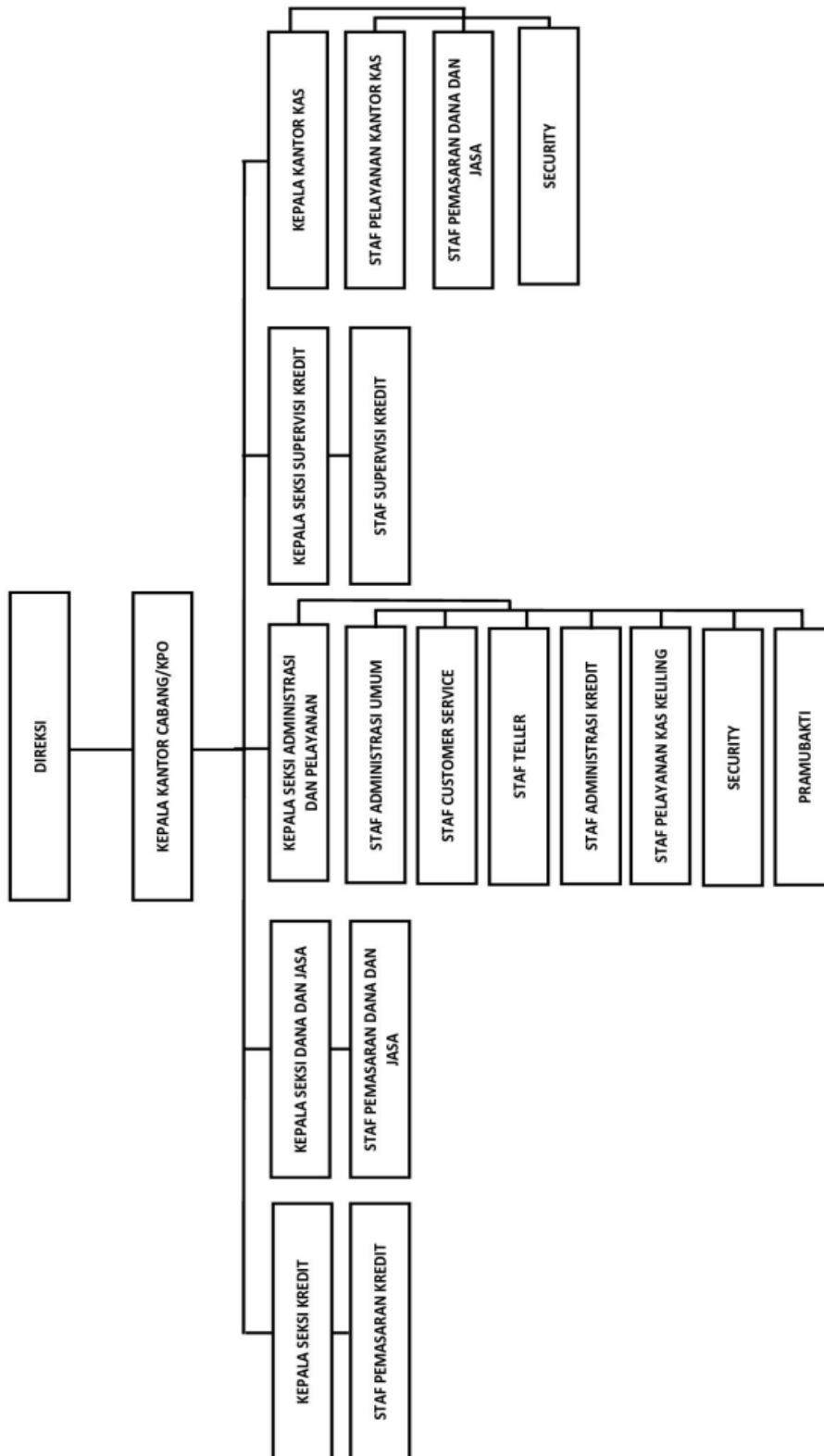
Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan bisnis oleh Direksi, serta memberikan panduan ketika dibutuhkan melalui rapat. Dalam rapat-rapat tersebut, kami meninjau antara lain kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta perkembangan strateginya, dan membahas bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam bisnis dan mengkaji perkembangan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko. Komisaris percaya bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dengan baik. Komisaris menilai bahwa Direksi senantiasa memperhatikan arahan yang diberikan Komisaris. Hal ini diwujudkan melalui komunikasi proaktif yang terjalin di antara keduanya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi rutin. Komisaris memandang Direksi senantiasa menjalankan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, independence* dalam menjalankan operasionalnya. Komisaris berharap agar Direksi terus fokus pada empat hal, yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas bisnis untuk membangun fundamental yang kuat, meningkatkan efisiensi, dan berusaha untuk mencapai kepuasan nasabah. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, Komisaris yakin bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dapat memenuhi target-targetnya pada tahun 2021 maupun tahun-tahun mendatang.

5.2. Struktur Organisasi;

Struktur organisasi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dirancang untuk senantiasa memenuhi tuntutan perkembangan usaha dan dengan menerapkan prinsip tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.



Struktur Organisasi dan Tata Kerja
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kantor Cabang/KPO



5.3. Bidang usaha dan kegiatan utama BPR;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha keuangan/perbankan dan sebagai penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dalam menjalankan usahanya PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, melakukan penempatan dana dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR);

Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab social perusahaan adalah bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap seluruh stakeholders baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perusahaan. Perusahaan memandang kegiatan CSR merupakan bagian dari kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) meningkatkan perhatian terhadap program-program CSR yang dijalankan.

Pada tahun 2022 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) turut berpartisipasi mendukung perlombaan busana Encim (Kebaya Encim), Mendukung Kegiatan Hari Menabung Nasional, mendukung kegiatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, berpartisipasi dalam kegiatan PKK Kabupaten Tangerang, berpartisipasi dalam membantu korban bencana gempa yang terjadi di Cianjur yang dikoordinasi oleh Perbarindo dan Perbamida. Kegiatan CSR yang dilakukan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) diharapkan akan memberikan kontribusi positif sehingga akan berdampak kepada keberlanjutan usaha Perusahaan untuk jangka panjang serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. PT. BPR

Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merencanakan untuk meningkatkan kegiatan sosialnya di tahun-tahun mendatang.

5.5. Teknologi informasi

5.5.1. Sistem operasional;

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, pada Tahun 2013 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan Sistem Akuntansi Terpadu Versi 2.03 dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma). Teknologi Informasi tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan *corebanking* BPR, layanan transaksi-transaksi *online* pada setiap kantor BPR dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan layanan nasabah lainnya. Agar dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan serta pengendalian yang efektif dan efisien, maka akan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan penambahan *device* sesuai kebutuhan.

5.5.2. Sistem keamanan,

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi *database*, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan fasilitas Pusat Data (*data center*) dan *Disaster Recovery Center (DRC)* dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) yang berkedudukan di Gedung German Centre, Serpong. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas utama pemrosesan data Bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional Bank secara berkesinambungan. Sedangkan *Disaster Recovery Center (DRC)* adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*DataCenter*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (*business continuity*).

5.5.3. Penyedia jasa teknologi informasi;

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma) sebagai penyedia jasa teknologi informasi.

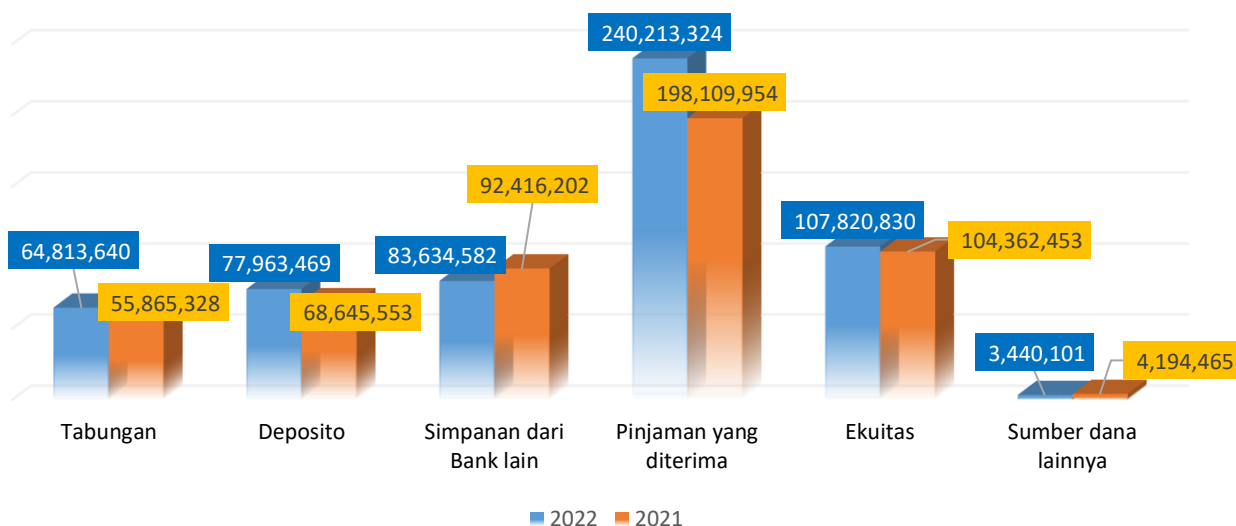
5.6. Perkembangan dan target pasar;

5.6.1. Perkembangan usaha

Perkembangan usaha PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.56.316.377 ribu, yaitu dari total asset pada tahun sebelumnya sebesar Rp.523.593.955 ribu menjadi sebesar Rp.579.910.332 ribu, dengan perkembangan komposisi sumber dana sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Sumber Dana	2022		2021		Pertumbuhan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Tabungan	64,813,640	11.22%	55,865,328	10.67%	8,948,311	16.02%
Deposito	77,963,469	13.49%	68,645,553	13.11%	9,317,917	13.57%
Simpanan dari Bank lain	83,634,582	14.47%	92,416,202	17.65%	(8,781,620)	-9.50%
Pinjaman yang diterima	240,213,324	41.57%	198,109,954	37.84%	42,103,370	21.25%
Ekuitas	107,820,830	18.66%	104,362,453	19.93%	3,458,377	3.31%
Sumber dana lainnya	3,440,101	0.60%	4,194,465	0.80%	(754,365)	-17.98%
Jumlah Sumber Dana	577,885,946	100%	523,593,955	100%	54,291,991	10.37%

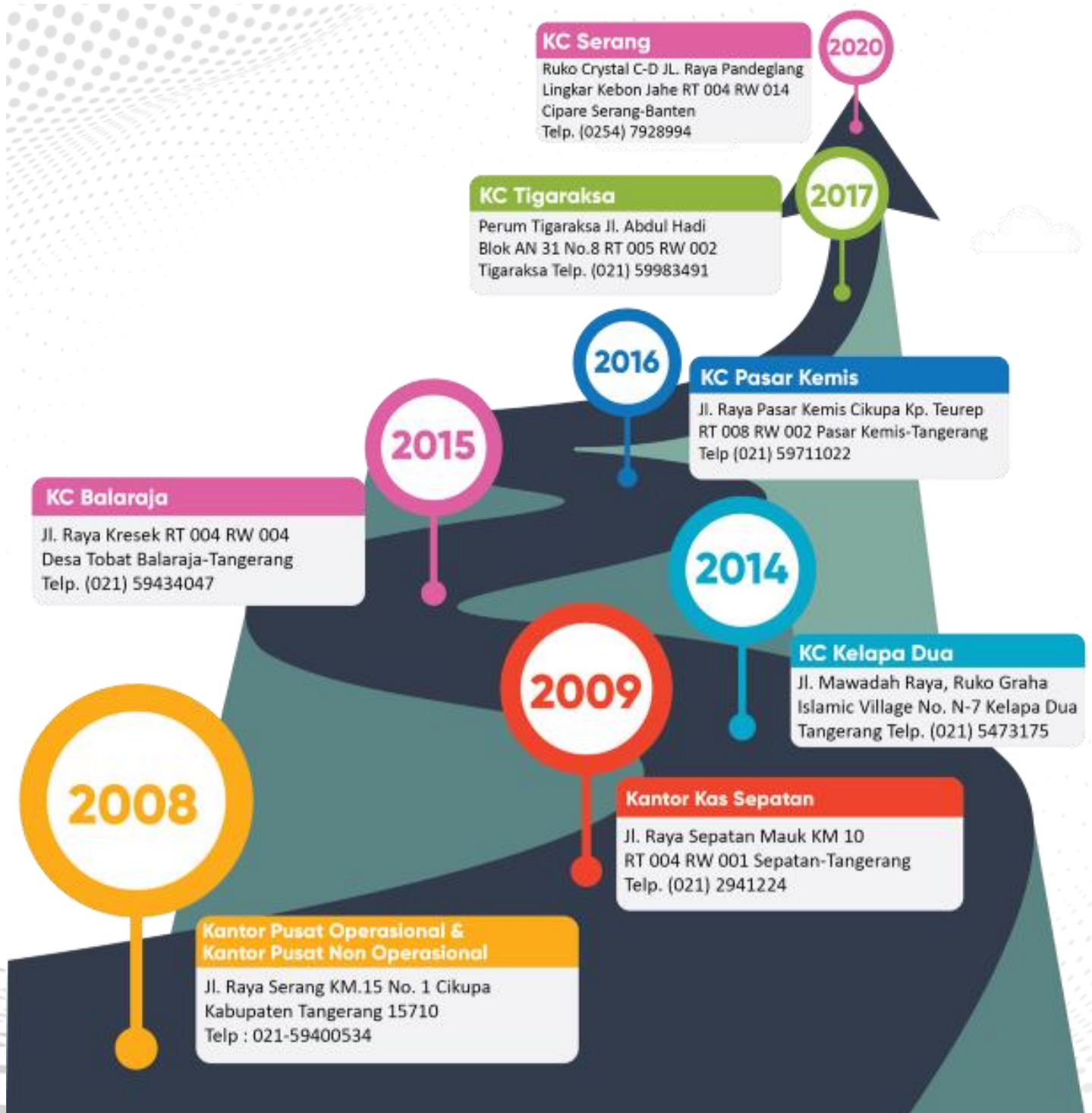


5.6.2. Target pasar

Pangsa pasar utama dalam rangka penghimpunan dana tabungan maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit masih didominasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), pangsa pasar penghimpunan dana tabungan lainnya berupa tabungan pelajar telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dan telah menjangkau para murid/siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui kerjasama langsung dengan pihak sekolah masing-masing.

5.7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



5.8. Kerjasama dan Mitra Usaha

Dalam rangka meningkatkan usahanya, baik dalam rangka peningkatan sumber pendanaan maupun penyaluran dana, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah bermitra dan melakukan berbagai kerjasama antara lain :

4.8.1. Kerjasama penghimpunan dana :

a. Bank Umum

Dalam kegiatan penghimpunan dana, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan bank umum dalam bentuk pinjaman yaitu dengan Bank BJB, Bank Banten, Bank Oke Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank J'Trust, Bank Permata, Bank Jatim, Bank Danamon, Bank DKI.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selain dengan Bank Umum, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam bentuk pinjaman yaitu dengan PT. BPR Daya Lumbung Asia dan PT. BPR Lestari. Dalam bentuk penghimpunan dana baik berupa deposito maupun tabungan. Antara lain sebagai berikut:

1. PT. BPR Hidup Artha Putra
2. PT. BPR Indra Candra
3. PT. BPR Ragam Peran Mandiri
4. PT. BPR Lestari
5. PD. BPR Bank Jogja
6. PT. BPR Daya Lumbung Asia
7. PT. BPR Berkah (Perseroda)
8. PT. BPR Dana Nagoya
9. PT. BPR Central Artha Rezeki
10. PT. BPR Gamon
11. PT. BPR Cahaya Artha Sejati
12. PT. BPR Arthadamas Mandiri
13. PT. BPR Athena Surya Prima
14. PT. BPR Bahtera Masyarakat
15. PT. BPR Baturaja

16. PT. BPR Universal
 17. PT. BPR Serang (Perseroda)
 18. PT. BPR Kredit Mandiri
 19. Perumda BPR Kota Bandung
 20. PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera
 21. PT. BPR Muara Sumber Dana
 22. PT. BPR Central Sejahtera
 23. PT. BPR Karya Artha Sejahtera
 24. PT. BPR Labuan Dana Sentosa
 25. PT. BPR Supra Artapersada
 26. PT. BPR Bringin Dana Sejahtera
 27. PT. BPR Bumidhana
- c. Lembaga Pendidikan
- PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah bekerjasama dengan 439 sekolah tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Tangerang dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Kerjasama dalam rangka penghimpunan dana juga dilakukan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain dengan PT. BPR Berkah (Perseroda), PT. BPR Serang (Perseroda), PD. Pasar Niaga Kerta Raharja, PT. LKM Artha Kerta Raharja, PT. Mitra Kerta Raharja, PDAM Tirta Kerta Raharja.
- e. Perusahaan Asuransi
- Dalam kegiatan penghimpunan dana PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk Tabungan dan Deposito antara lain dengan PT. Jamkrida Banten, PT. Asuransi Bangun Askrida.
- f. Lainnya
- Kerjasama penghimpunan dana juga dilakukan dengan pihak-pihak lainnya dalam bentuk deposito maupun tabungan.

4.8.2. Kerjasama penyaluran dana :

Kerjasama penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit, antara lain:

a. Pelaku Usaha (UMKM)

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menyalurkan kredit kepada para pelaku usaha (UMKM).

b. SKPD/BLUD

Kerjasama pemberian kredit dilakukan dengan SKPD/BLUD di wilayah Provinsi Banten, antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama pemberian kredit dengan 147 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Kerjasama pemberian kredit dengan 26 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
3. Kerjasama pemberian kredit dengan 30 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
4. Kerjasama pemberian kredit dengan 32 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
5. Kerjasama pemberian kredit dengan 34 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
6. Kerjasama pemberian kredit dengan 11 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

4.8.3. Kerjasama lainnya

Dalam menunjang kegiatan operasional PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain :

a. PT. Selaras Karya Dinamika Unggul (Sekardiu)

Pada tahun 2022 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan Kerjasama dengan Sekardiu dalam penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai.

b. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta

Pada tahun 2018 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan LPPI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;

c. PT. Damarindo

Pada akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan PT. Damarindo Mandiri untuk pegawai outsorcing.

d. PT. Telkom Sigma

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma) sebagai penyedia jasa teknologi informasi.

e. Asosiasi

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) juga bekerjasama dengan Perbarindo dan Perbamida dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;

f. Asuransi

Kerjasama dengan pihak asuransi juga dilakukan dalam rangka penjaminan kredit debitur antara lain PT. Jamkrida Banten.

g. Bank Umum

Kerjasama dengan Bank Umum dilakukan dalam rangka pendebetan rekening untuk pembayaran angsuran kredit, yaitu dengan PT. Bank BJB dan PT. Bank Banten.

5.9. Kepemilikan dalam kelompok usaha BPR

Seluruh Direksi dan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) maupun pada BPR lain yang dimiliki oleh para pemegang saham.

5.10. Keterkaitan

Keterkaitan antar pemegang saham, Direksi atau Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan Direksi dan/atau Komisaris, meliputi:

5.10.1. Keterkaitan dalam kepemilikan

- a. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai pemegang saham mayoritas PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), saat ini memiliki saham sebesar 79,34% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);

- b. Pemerintah Provinsi Banten saat ini memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Pemegang saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen);
- d. PT. Bank Jabar Banten memiliki saham pada pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen);

dalam ribuan rupiah

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN MODAL DI BPR KRG		KEPEMILIKAN MODAL DALAM KELOMPOK USAHA BPR		
	Rp.000	%	Kepemilikan BPR Lain	Rp.000	%
Pemkab. Tangerang	198,350,000	79.34%			
Pemprov. Banten	50,000,000	20.00%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	15,000,000	33.01%
			2. PD. BPR Berkah	300,000	2.35%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	900,000	5.84%
Pemprov. Jawa Barat	600,000	0.24%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	3,000,000	7.59%
			2. PD. BPR Berkah	300,000	2.35%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	200,000	5.84%
PT. Bank BJB	1,050,000	0.42%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	2,000,000	5.28%
			2. PD. BPR Berkah	150,000	1.18%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	400,000	2.63%
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-

5.10.2. Keterkaitan dalam kepengurusan

Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BPR lain paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Direksi dan Komisaris BPR yang berangkutan, adalah sebagai berikut:

- a. Bangbang Purnawan saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. BPR Hariarta Sedana.
- b. Beni Subarsyah saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. BPR Baleendah Rahayu.
- c. Antara Direksi dan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

5.10.3. Keterkaitan dalam kepengurusan

- a. Pemerintah Kabupaten Tangerang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama :
 - 1. Tidak memiliki saham pada badan usaha lain yang dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris;

2. Memiliki saham dengan jumlah kurang dari 10% (sepuluh persen) pada PT. Bank BJB yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 3. Memiliki saham secara mayoritas pada Perusahaan Daerah lainnya, antara lain PD. Pasar Niaga Kerta Raharja dan PT. LKM Artha Kerta Raharja yang saat ini menjadi nasabah deposan dan penabung pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
- b. Pemerintah Provinsi Banten baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada BPR lain dan badan usaha lainnya, meliputi:
1. PT. BPR Serang sebesar 34.14% ;
 2. PD. BPR Berkah sebesar 15%;
 3. PD. BPR Warung Gunung sebesar 15%;
 4. PT. Bank Jabar Banten, Tbk sebesar 5,37%;
 5. PT. Banten Global Development sebesar 99%;
 6. PT. Jamkrida Banten sebesar 90,03% ;
 7. PT. LKM Rangkas Bitung sebesar 10%
- c. Pemegang saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten memiliki saham pada badan usaha lain yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya, akan tetapi kepemilikan saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) masing-masing kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Direksi dan/atau Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham pada badan usaha lain yang dimiliki oleh para pemegang saham.

5.11. Sumber Daya Manusia (SDM)

5.11.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI	
	2022	2021
a. Komite	2	2
- S2	1	1
- S1	1	1
- D3		
- SLTA		
b. Pejabat Eksekutif	11	11
- S2	1	2
- S1	10	9
- D3		
- SLTA		
c. Kepala Seksi	36	32
- S2		
- S1	27	25
- D3	5	4
- SLTA	4	3
d. Staf	115	101
- S2		
- S1	63	66
- D3	6	7
- SLTA	46	28
- SLTP		
e. TKK WT	6	6
- SLTA	5	5
- SMP	1	1
e. Tenaga Alih Daya	26	25
- SLTA	26	25
- SMP		
JUMLAH PEGAWAI	196	177

5.11.2. Pendidikan dan pengembangan SDM

Pendidikan dan pengembangan selama tahun 2022 yang dilakukan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai yang diikutsertakan
1	Bidang Marketing Kredit	9	100
2	Bidang Marketing Dana	5	52
3	Bidang Supervisi Administrasi Kredit	11	76
4	Bidang Umum & SDM	13	178
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan & TI	17	89
6	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	15	108
7	Bidang Lainnya	21	85
Jumlah		91	688

5.12. Kebijakan Remunerasi

Penghasilan dan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, meliputi :

5.12.1. Penghasilan Direksi, terdiri dari :

- Gaji pokok Direktur Utama yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
- Gaji pokok Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
- Tunjangan istri/suami dan anak;
- Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR;
- Tunjangan Hari Raya sesuai dengan kemampuan BPR;

5.12.2. Fasilitas yang didapat Direksi:

- Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR;

- b. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
- c. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR serta dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- d. Setiap tahun direksi mendapatkan Tantiem sebesar 4% yang didapat dari hasil laba bersih akhir tahun dikalikan jumlah secara proporsional.
- e. Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) untuk total semua pengurus dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- f. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

5.12.3. Penghasilan Komisaris, terdiri dari :

- a. Komisaris Utama, diberikan honorarium paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- c. Komisaris diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR dan diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR dengan syarat Dewan pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya;

- d. Komisaris dapat diberikan uang tatiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- e. Komisaris mendapatkan uang transportasi setiap kedatangan.
- f. Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan sebagaimana penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1.

5.13. Perubahan Penting Lainnya

Bagian Kedua

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN & OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

KREDIT



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)**

LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
Neraca	1 - 2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Cataan atas Laporan Keuangan	6
Informasi Umum	6
Kebijakan Akuntansi	8
Informasi yang Mendukung Pos-Pos Neraca	13
Informasi yang Mendukung Pos-Pos Laba Rugi	25
Pengungkapan Lainnya	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya	
Lampiran 2: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	
Lampiran 3: Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
PT KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ai Suherlan
Alamat Domisili : Komp RSS Pemda Blok C.3 No.6 Banjar Sari, Cipocok Jaya Kota Serang
No. Telepon : 0812 9357 926
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Uus Mustaudie
Alamat Domisili : Kp. Kopibera, Cinangka, Kec.Cinangka, Kabupaten Serang
No. Telepon : 0818 979 655
Jabatan : Direktur Operasional

Nama : Deni Setia Wahyudi
Alamat Domisili : Kp. Long Jaha, Panggung Jati, Kec. Taktakan, Kota Serang
No. Telepon : 0878 7177 7477
Jabatan : Direktur SDM Umum dan Kepatuhan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
2. Laporan keuangan PT Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Intern dalam PT Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang, 6 Maret 2023

Direktur Utama

Direktur Operasional

Direktur SDM, Umum
Dan Kepatuhan


Ai Suherlan, S.E.


Uus Mustaudi, S.E.


Deni Setia Wahyudi, S.E.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00013/3.0410/AU.2/07/1624-1/1/III/2023

Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Maret 2022.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Branch Office | Bogor
License Number : 567/KM.1/2019 dated October 14, 2019
Kota Wisata, Ruko Maison Avenue MA 12, Cileungsi, Kab. Bogor 16820. Jawa Barat
www.kapjsr.co.id

Jakarta | Bogor | Bekasi | Bandung | Pekanbaru

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo & Rekan**



Danang Rahmat Surono, CPA
No.Reg. Izin AP.1624



6 Maret 2023

Branch Office | Bogor

License Number : 567/KM.1/2019 dated October 14, 2019

Kota Wisata, Ruko Maison Avenue MA 12, Cileungsi, Kab. Bogor 16820. Jawa Barat
www.kapjsr.co.id

Jakarta | Bogor | Bekasi | Bandung | Pekanbaru

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
NERACA

31 Desember 2022
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Cat.	31 Des 2022	31 Des 2021
<u>ASET</u>			
K a s	3.1.	4.210.524.500	2.169.116.100
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3.2.	2.826.101.099	2.686.086.603
Penempatan pada Bank Lain	3.3.	126.208.167.511	135.371.889.605
Penyisihan Kerugian Penempatan pada Bank Lain		(176.801.301)	(165.961.426)
Jumlah Penempatan pada Bank Lain		126.031.366.210	135.205.928.180
Kredit Yang Diberikan	3.4.	447.479.475.049	390.237.373.543
Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan		(9.415.925.811)	(13.324.822.469)
Jumlah Kredit Yang Diberikan		438.063.549.238	376.912.551.074
Aset Tetap dan Inventaris	3.5.	17.170.672.664	17.092.717.274
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		(11.653.193.993)	(10.890.707.943)
Nilai Buku Aset Tetap dan Inventaris		5.517.478.671	6.202.009.331
Aset Takberwujud - Nilai Bersih	3.6.	43.475.000	500.000
Aset Lain-lain	3.7.	1.193.451.184	417.763.986
TOTAL ASET		577.885.945.903	523.593.955.274

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
NERACA (LANJUTAN)
 31 Desember 2022
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Cat.	31 Des 2022	31 Des 2021
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	3.8.	938.495.186	2.307.033.414
Utang Bunga	3.9.	1.200.592.847	1.163.008.538
Utang Pajak	3.10.	711.643.541	299.085.527
Simpanan	3.11.	142.777.109.148	124.510.881.450
Simpanan dari Bank Lain	3.12.	83.634.582.302	92.416.201.898
Pinjaman Yang Diterima	3.13.	240.213.323.964	198.109.953.876
Kewajiban Imbalan Kerja	3.14.	343.065.394	343.065.394
Kewajiban Lain-Lain	3.15.	246.303.702	82.272.415
Jumlah Kewajiban		<u>470.065.116.085</u>	<u>419.231.502.513</u>
MODAL			
Modal Disetor	3.16.	71.650.000.000	71.650.000.000
<u>Saldo Laba</u>	3.17.		
Cadangan Umum		16.210.900.925	15.450.335.104
Cadangan Tujuan		10.417.025.262	9.656.459.440
Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya :			
- Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu		-	-
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		9.542.903.632	7.605.658.217
Jumlah Saldo Laba		<u>36.170.829.818</u>	<u>32.712.452.761</u>
Jumlah Ekuitas		<u>107.820.829.818</u>	<u>104.362.452.761</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>577.885.945.903</u>	<u>523.593.955.274</u>

Tangerang, 6 Maret 2023

Direktur Utama,

Direktur Operasional,

Direktur SDM, Umum
dan Kepatuhan

Ai Suherlan, S.E.

Uus Mustaudie, S.E.

Deni Setia Wahyudi, S.E.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Cat.	2021	2021
<u>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</u>			
<u>Pendapatan Operasional</u>	4.1.		
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual		77.196.339.110	77.025.283.857
Provisi & Biaya Transaksi		4.882.689.775	4.675.693.774
Jumlah		82.079.028.885	81.700.977.631
Beban Bunga		(32.218.746.431)	(31.538.601.897)
Pendapatan Bunga (Neto)		49.860.282.454	50.162.375.734
Pendapatan Operasional Lainnya		9.017.150.685	2.699.723.847
Jumlah Pendapatan Operasional		58.877.433.139	52.862.099.580
<u>Beban Operasional</u>			
Beban penyisihan kerugian/penyusutan	4.2.	7.557.277.998	5.855.626.588
Beban pemasaran	4.3.	769.211.556	317.718.145
Beban administrasi dan umum	4.4.	38.390.497.147	36.622.087.180
Jumlah Beban Operasional		46.716.986.701	42.795.431.913
Laba (Rugi) Operasional		12.160.446.439	10.066.667.668
<u>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</u>	4.5.		
Pendapatan Non Operasional		521.846.932	192.849.027
Beban Non Operasional		(447.801.719)	(508.673.018)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		74.045.213	(315.823.991)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		12.234.491.652	9.750.843.677
Taksiran Pajak Penghasilan	4.6.	2.691.588.020	2.145.185.460
Laba (Rugi) Neto		9.542.903.632	7.605.658.217

Tangerang, 6 Maret 2023

Direktur Utama,

Direktur Operasional,

Direktur SDM, Umum
dan Kepatuhan

Ai Suherlan, S.E.

Uus Mustaudie, S.E.

Deni Setia Wahyudi, S.E.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal		Saldo Laba		Jumlah
	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan	
01 Januari 2021	71.650.000.000	8.777.279.014	8.873.306.073	8.791.804.254	98.092.389.342
Pembagian Laba	-	-	-	(7.033.443.403)	(7.033.443.403)
Pembentukan Cadangan:	-	-	-	-	-
- Laba Tahun Lalu	-	879.180.425	879.180.425	(1.758.360.851)	-
- Reklasifikasi Dana Pembinaan	-	-	5.697.848.605	-	5.697.848.605
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	7.605.658.217	7.605.658.217
31 Desember 2021	71.650.000.000	9.656.459.440	15.450.335.104	7.605.658.217	104.362.452.761
Pembagian Laba	-	-	-	(6.084.526.574)	(6.084.526.574)
Pembentukan Cadangan	-	760.565.822	760.565.822	(1.521.131.643)	-
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	9.542.903.632	9.542.903.632
31 Desember 2022	71.650.000.000	10.417.025.262	16.210.900.926	9.542.903.632	107.820.829.819

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Cat.	2022	2021
<u>Arus Kas dari Aktifitas Operasi</u>			
Laba (Rugi) Neto		9.542.903.632	7.605.658.217
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :			
Penyusutan Aset Tetap		762.486.050	1.387.709.548
Penyisihan kerugian untuk :			
Penempatan pada bank lain (selain giro)		10.839.876	17.506.623
Kredit		(3.908.896.658)	481.234.809
Perubahan aset dan kewajiban operasi:			
Penempatan pada bank lain		9.163.722.094	(40.045.640.318)
Pendapatan bunga yang akan diterima		(140.014.496)	1.206.103.993
Kredit yang diberikan		(57.242.101.506)	13.990.639.608
Aset lain-lain		(775.687.199)	568.690.162
Kewajiban segera		(1.368.538.228)	2.040.155.359
Utang Bunga		37.584.308	(49.127.799)
Utang pajak		412.558.014	223.979.931
Simpanan		18.266.227.698	17.863.257.396
Simpanan dari Bank Lain		(8.781.619.596)	34.710.306.204
Pinjaman Yang Diterima		42.103.370.088	(32.835.301.604)
Kewajiban Imbalan Kerja		-	-
Kewajiban lain-lain		164.031.287	(5.096.794.618)
Arus kas neto dari aktivitas operasi		<u>8.246.865.364</u>	<u>2.068.377.511</u>
<u>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</u>			
(Kenaikan)/Penurunan aset tetap dan inventaris		(77.955.390)	(395.419.625)
(Kenaikan)/Penurunan aset tak berwujud		(42.975.000)	18.220.813
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi		<u>(120.930.390)</u>	<u>(377.198.812)</u>
<u>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</u>			
Cadangan Umum		760.565.822	6.577.029.030
Cadangan Tujuan		760.565.822	879.180.425
Saldo Laba Tahun Lalu		(7.605.658.217)	(8.791.804.254)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan		<u>(6.084.526.574)</u>	<u>(1.335.594.798)</u>
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas		<u>2.041.408.400</u>	<u>355.583.900</u>
Kas Awal Periode		2.169.116.100	1.813.532.200
Kas Akhir Periode	3.1.	<u>4.210.524.500</u>	<u>2.169.116.100</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

1. INFORMASI UMUM

Sejarah Singkat

PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), dahulu merupakan PD Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Dasar perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas daerah (perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. **Persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Badan Hukum**
BPR melakukan perubahan badan hukum berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 4 September 2020 tentang persetujuan perubahan badan hukum dan nama PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
- b. **Persetujuan Prinsip**
BPR mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 241/DIR/BPR-KR/IX/2020 tanggal 22 September 2020. Perubahan badan hukum tersebut dari PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor S-196/KR.011/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
- c. **Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang**
Perubahan badan hukum BPR mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang.
- d. **Perubahan Badan Hukum**
Berdasarkan akta nomor 23 notaris Harsono, SH, tanggal 23 Desember 2020, tentang pendirian perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 23 Desember 2020. Berdasarkan akta tersebut, maka PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) resmi didirikan, namun belum dilakukan pengalihan izin usaha sebagai dari PD BPR Kerta Raharja. Sehingga badan hukum baru tersebut belum beroperasi secara komersil pada tahun 2020.
- e. **Pengalihan Izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru**
BPR mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dengan surat nomor 011/DIR/BPR-KR/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal permohonan pengalihan izin usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru. Permohonan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/KR.011/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal persetujuan permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
Dengan telah diterbitkannya surat persetujuan pengalihan izin usaha dari OJK, maka sejak tanggal 2 Maret 2021 BPR efektif melakukan kegiatan usahanya melalui badan hukum baru dengan nama PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Pengalihan izin usaha ini juga berdampak terhadap laporan keuangan, dimana BPR akan melakukan pengalihan hak dan kewajiban yang tersaji dalam laporan keuangan dari Badan Hukum Lama (PD BPR Kerta Raharja) kepada Badan Hukum Baru PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Maksud dan Tujuan

PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) ("BPR") didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan rakyat melalui aktivitasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, dan beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

Lokasi Kantor

BPR berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 15 No.1 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Telp. (021) 59400534, 59400540 Fax. (021) 59400283.

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Susunan Pengurus dan Jumlah Karyawan

Berdasarkan akta nomor 63 Chairul Anam Abdullah, SH, M.Kn., tanggal 23 September 2022, yang telah tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0059244 tanggal 27 September 2022, susunan pengurus BPR pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris Independen	:	Beni Subarsyah
Anggota Komisaris Independen	:	Bangbang Purnawan

Direksi:

Direktur Utama	:	Ai Suherlan, S.E.
Direktur Operasional	:	Uus Mustaudie, S.E.
Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan	:	Deni Setia Wahyudi, S.E.

Berdasarkan akta nomor 29 notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn., tanggal 20 Desember 2021, tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Pengangkatan Komisaris Utama PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03.0489129 Tanggal 21 Desember 2021. Susunan pengurus BPR pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris	:	Bangbang Purnawan
Komisaris	:	Mohamad Tahyar, ST., M.Si.

Direksi:

Direktur Utama	:	Ai Suherlan, S.E.
Direktur Operasional	:	Uus Mustaudie, S.E.
Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan	:	Deni Setia Wahyudi, S.E.

Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan BPR pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebanyak 194 dan 177 Orang (tidak diaudit).

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Pegawai Tetap	138	144
Pegawai Kontrak	30	8
Pegawai Outsourcing	26	25
Jumlah	194	177

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi BPR berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR).

Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan:

- Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar.
- Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian arus kas dan setara kas didefinisikan sebagai jumlah-jumlah yang terkandung di neraca sebagai akun kas, giro Bank Indonesia serta giro pada Bank lain.

Kecuali untuk penempatan dalam bentuk giro, saldo penempatan pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan kerugian (*offsetting account*).

b. Mata Uang Pelaporan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013, Mata Uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp).

c. Kas

Kas yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini adalah kas besar, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain yaitu jumlah dana setiap penempatan BPR pada bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dan pada BPR lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Saldo penempatan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank.

Kecuali untuk penempatan dalam bentuk giro, Saldo penempatan pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan kerugian (*offsetting account*).

e. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Kredit yang Diberikan

Kredit yaitu kredit yang diberikan oleh BPR baik kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet neto yaitu baki debet dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi maka nilai yang dimasukkan setelah memperhitungkan pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi dan cadangan kerugian restrukturisasi. Pos kredit yang diberikan dibedakan untuk kredit kepada BPR, kepada Bank Umum, kepada non Bank - Pihak terkait, dan kepada non Bank - Pihak tidak terkait. Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/ konsorsium/ sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dimasukkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan.

Kredit yang diberikan dalam rangka channeling dimana BPR tidak memiliki risiko kredit tak tertagih tidak dimasukkan pada pos ini melainkan pada Rekening Administratif.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Bunga kredit *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima. Bunga kredit *non-performing* diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

g. Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian/Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) serta estimasi komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan aset produktif adalah penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan/penempatan.

BPR membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan Peraturan Otoritas

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Penyisihan Kerugian (Lanjutan)

Adapun besarnya pembentukan penyisihan untuk masing-masing aset produktif menurut POJK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Cadangan Umum :

- 0,15% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar.

Cadangan Khusus :

- 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
- 10% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
- 50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurang dengan nilai
- 100% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Macet.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagai

- 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang - 14 - diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam
- 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

Agunan selain yang dimaksud pada ketentuan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris yaitu aset berwujud fisik yang dimiliki BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran umur pemakaian aset tetap, yaitu:

Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif (%)
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 Tahun	25,00
Kelompok 2	8 Tahun	12,50
Kelompok 3	16 Tahun	6,25
Kelompok 4	20 Tahun	5,00
II. Bangunan		
Permanen	20 Tahun	5,00
Kelompok 2	10 Tahun	10,00

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan Laba-Rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain yaitu nilai perolehan aset lainnya yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Termasuk dalam pos ini antara lain pajak/biaya dibayar dimuka, piutang kepada perusahaan asuransi, commemorative coins/notes yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

j. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera yaitu kewajiban BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar baik dengan perintah pemberi amanat maupun tidak.

k. Utang Bunga

Utang Bunga yaitu akrual bunga untuk produk simpanan (tabungan/deposito), pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi, baik dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

l. Utang Pajak

Utang Pajak yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan oleh BPR, meliputi:

- Utang pajak atas PPh 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhirnya masa pajak tahunan yaitu selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh 25 (angsuran pajak / pajak dibayar dimuka).
- Utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak antara lain melalui hasil pemeriksaan.

m. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana Tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

- Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

- Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Ekuitas terdiri dari:

- Modal Dasar, yaitu jumlah modal BPR yang tercantum dalam anggaran dasar BPR.
- Modal Disetor, yaitu dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR dan telah didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- Dana Setoran Modal, yaitu dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pos ini dirinci atas:
 - a) Cadangan Tujuan
Cadangan Tujuan yaitu bagian laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
 - b) Cadangan Umum
Cadangan Umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - c) Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuan Penggunaannya
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuan Penggunaannya yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota belum diputuskan penggunaannya, rugi BPR pada periode lalu, laba tahun berjalan, dan rugi tahun berjalan.

o. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha utama BPR yang terdiri atas:

1) Pendapatan Bunga

Yang termasuk dalam akun ini adalah pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan oleh BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dimasukkan dalam pos ini adalah amortisasi diskonto, provisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a) Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan kontrak dengan pihak lain atas SBI, penempatan dana / kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi / biaya transaksi.

b) Amortisasi Provisi

Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip SAK ETAP.

2) Pendapatan Operasional Lainnya

Yang termasuk dalam pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas utama BPR, selain dari pendapatan bunga.

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. **Beban Bunga**

Beban Bunga adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1) **Bunga Kontraktual**

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah beban bunga yang secara kontraktual diperjanjikan oleh BPR kepada bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi (transaction cost).

2) **Amortisasi Biaya Transaksi**

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan dana pada SBI, penempatan dana pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

q. **Imbalan Kerja**

BPR telah mengakui dan menyajikan biaya dan kewajiban imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, dan pascakerja di dalam laporan keuangannya, berdasarkan ketentuan dalam SAK-ETAP Bab 23, serta Pedoman Akuntansi Bank Perkrediton Rakyat Bab V angka 9 tentang Akuntansi Kewajiban Imbalan Kerja.

3 INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS NERACA

3.1. K A S

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Kas Besar Kantor Pusat Operasional	744.548.100	505.380.600
- Kas KC Kelapa Dua	828.950.300	413.006.900
- Kas KC Tiga Raksa	938.150.900	326.648.700
- Kas KC Balaraja	796.491.900	228.351.000
- Kas KC Pasar Kemis	584.588.300	239.865.200
- Kas KC Serang	317.795.000	455.863.700
	4.210.524.500	2.169.116.100

3.2. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pendapatan Bunga Kredit	2.781.530.571	2.639.635.192
- Pendapatan Bunga Penempatan Pada Bank Lain	44.570.528	46.451.411
	2.826.101.099	2.686.086.603

3.3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Penempatan Giro	70.001.093.804	62.307.520.902
b. Penempatan Tabungan	18.929.927.875	17.059.368.703
c. Penempatan Deposito	37.277.145.833	56.005.000.000
Jumlah Bruto	126.208.167.511	135.371.889.605
Dikurang: Penyisihan Kerugian	(176.801.301)	(165.961.426)
Jumlah Bersih	126.031.366.210	135.205.928.180

Tingkat bunga penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Penempatan Giro	1-1.5%	1-1.5%
b. Penempatan Tabungan	2%	2%
c. Penempatan Deposito	2.5-6%	2.5-6%

3.3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Rincian dari Penempatan Pada Bank Lain adalah sebagai berikut:

a. Penempatan Giro

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- PT. Bank BJB, Tbk	2%	10.781.476.485	13.832.592.352
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	2%	3.861.600.785	3.149.996.751
- PT. Bank BRI (Persero), Tbk	2%	13.006.574.761	4.660.132.326
- PT. Bank CIMB Niaga (Escrow Accou	2%	10.216.503.496	11.614.330.945
- PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	2%	254.195.944	254.095.612
- PT. BPD Banten, Tbk	2%	4.402.402.111	6.076.460.092
- PT. Bank OCBC NISP	2%	370.322.732	470.805.274
- PT. Bank Oke Indonesia / Andara	2%	1.010.703.499	260.771.624
- PT. Bank Sahabat Sampoerna	2%	-	-
- PT. Bank JTRUST Indonesia, Tbk	2%	268.518.602	662.325.991
- PT. Bank Permata, Tbk	2%	9.411.052.917	21.326.009.935
- PT BPD DKI	2%	5.087.944.000	-
- PT Bank Danamon	2%	11.093.193.580	-
- PT BPD Jatim	2%	236.604.891	-
Jumlah		70.001.093.804	62.307.520.902

b. Penempatan Tabungan

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- PT. Bank Permata, Tbk	2-4%	16.695.050.022	15.276.537.335
- PT. BPR Lestari	11,50%	373.740.994	260.133.913
- PT Bank Muamalat Indonesia	5,25%	1.861.136.859	1.522.697.455
Jumlah		18.929.927.875	17.059.368.703

c. Penempatan Deposito

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- PT. Bank Oke d/h PT Bank Andara	3.5-6%	4.650.000.000	4.650.000.000
- PD. BPR Berkah	6%	3.000.000.000	3.000.000.000
- PT. Bank CIMB Niaga	4%	100.000.000	100.000.000
- PT BPR Amal Bhakti	6%	500.000.000	500.000.000
- BPR Intan Jabar	6,25%	750.000.000	750.000.000
- PT Bank Muamalat Indonesia	4-5%	7.000.000.000	15.000.000.000
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	7%	-	18.000.000.000
- PT. Bank JTRUST Indonesia, Tbk	2%	1.500.000.000	1.500.000.000
- PT BPD BJB, Tbk	2,50%	972.145.833	-
- Perumda BPR Kuningan	6,25%	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Wibawa Mukti Jabar	6,25%	250.000.000	250.000.000
- PT BPD Banten Tbk	3.5-6.5%	5.755.000.000	9.755.000.000
- PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)	6,25%	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Baturaja	6,00%	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Syariah Lampung	7,91%	2.000.000.000	-
- PT BPD DKI	2,00%	1.250.000.000	-
- PT BPR Lestari Banten	2,00%	1.000.000.000	-
- BPR Lumbung Asia	3,75%	750.000.000	-
- BPR Artha Sedana	6,25%	2.000.000.000	-

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

- BPR Parung	6,25%	300.000.000	-
- BPR Rasyid	6,25%	2.000.000.000	-
- PT BPRS PNM Mentari	8,00%	1.000.000.000	-
Jumlah		37.277.145.833	56.005.000.000

3.4. KREDIT YANG DIBERIKAN

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
Kredit yang Diberikan - Pokok	456.294.245.855	397.491.493.466
Provisi	(8.418.617.317)	(6.731.874.342)
Administrasi & Biaya Transaksi	49.403.358	26.683.837
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	(445.556.847)	(548.929.418)
Jumlah Kredit yang Diberikan	447.479.475.049	390.237.373.543
Penyisihan Kerugian	(9.415.925.811)	(13.324.822.469)
Jumlah	438.063.549.238	376.912.551.074

Rincian kredit berdasarkan sektor ekonomi:

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
Perdagangan	12-14%	3.626.892.714	4.182.390.569
Jasa Jasa	12-14%	4.029.898.976	13.915.590.123
Perindustrian	12-14%	8.616.936	179.529.210
Pertanian	12-14%	-	-
Lainnya	6-20,75%	448.628.837.229	379.213.983.563
Jumlah Kredit yang Diberikan - Pokok		456.294.245.855	397.491.493.466
Provisi		(8.418.617.317)	(6.731.874.342)
Administrasi & Biaya Transaksi		49.403.358	26.683.837
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan		(445.556.847)	(548.929.418)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		447.479.475.049	390.237.373.543

Rincian kredit berdasarkan pengelompokan oleh BPR:

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Kredit Multiguna	20,75%	276.303.888.760	328.227.060.526
- Kredit Multiguna Flat	20,75%	19.979.353	-
- Kredit KPT Sertifikasi	12,75%	12.394.686.629	16.060.440.433
- Kredit Guna Bhakti / Pegawai Intern	6%	7.804.820.357	7.105.408.431
- Kredit Multi Lembaga Usaha	12,75%	6.561.555.217	13.000.000.000
- Kredit Multi Lembaga Usaha Rev	12,50%	8.433.872.301	-
- Kredit Multi Usaha	12%	2.142.949.012	2.895.947.612
- Kredit Penghasilan Tetap	12,75%	37.680.946.662	23.455.361.143
- Kredit Mikro Raharja	12%	2.825.373.960	2.937.771.004
- Kredit Guna Bhakti I	8-9%	6.578.904.728	3.809.504.318
- Kredit Guna Payroll	12-14,75%	95.547.268.877	-
Jumlah Kredit yang Diberikan - Pokok		456.294.245.855	397.491.493.466
Provisi		(8.418.617.317)	(6.731.874.342)
Administrasi & Biaya Transaksi		49.403.358	26.683.837
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan		(445.556.847)	(548.929.418)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		447.479.475.049	390.237.373.543

Rincian kredit berdasarkan kolektibilitas

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Lancar	413.739.417.972	355.296.269.522
- Dalam Perhatian Khusus	25.929.464.741	23.814.036.691
- Kurang Lancar	2.134.810.763	4.021.462.966
- Diragukan	2.811.011.891	3.927.710.141
- Macet	11.679.540.487	10.432.014.146

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Jumlah Kredit yang Diberikan - Pokok	456.294.245.855	397.491.493.466
Provisi	(8.418.617.317)	(6.731.874.342)
Administrasi & Biaya Transaksi	49.403.358	26.683.837
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	(445.556.847)	(548.929.418)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	447.479.475.049	390.237.373.543

3.4. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Rincian kredit berdasarkan hubungan keterkaitan

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Terkait	6-9%	2.129.709.609	2.326.109.532
- Tidak Terkait	8-20.75%	454.164.536.246	395.165.383.933
Jumlah Kredit yang Diberikan - Pokok		456.294.245.855	397.491.493.466
Provisi		(8.418.617.317)	(6.731.874.342)
Administrasi & Biaya Transaksi		49.403.358	26.683.837
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan		(445.556.847)	(548.929.418)
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		447.479.475.049	390.237.373.543
<u>Penyisihan Kerugian</u>			
		31 Des 2022	31 Des 2021
- Lancar		(413.739.418)	(71.059.254)
- Dalam Perhatian Khusus		(402.012.491)	(711.512.566)
- Kurang Lancar		(109.099.143)	(399.474.489)
- Diragukan		(717.794.552)	(1.890.680.070)
- Macet		(7.773.280.204)	(10.252.096.091)
Jumlah		(9.415.925.811)	(13.324.822.469)

3.5. ASET TETAP DAN INVENTARIS

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Tanah	520.288.000	520.288.000
- Gedung	7.219.815.500	7.219.815.500
- Inventaris	9.430.569.164	9.352.613.774
Nilai Perolehan	17.170.672.664	17.092.717.274
- Akumulasi Penyusutan	(11.653.193.993)	(10.890.707.943)
Nilai Buku	5.517.478.671	6.202.009.331

3.6. ASET TAKBERWUJUD

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
Nilai Perolehan		
- Program aplikasi IT	230.922.500	186.522.500
Jumlah Nilai Perolehan	230.922.500	186.522.500
Akumulasi Amortisasi	(187.447.500)	(186.022.500)
Nilai Buku	43.475.000	500.000

3.7. ASET LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Sewa Gedung Kantor Dibayar Dimuka	836.712.951	160.925.901
- Premi Asuransi Dibayar Dimuka	161.350.700	136.739.257
- Lainnya	195.387.533	120.098.828
Jumlah	1.193.451.184	417.763.986

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

3.8. KEWAJIBAN SEGERA

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pph Pasal 21	247.166.101	79.189.125
- PPh Pasal 23	82.076.559	75.469.257
- PPh Pasal 25	298.372.448	400.389.294
- Titipan Notaril	14.750.000	23.250.000
- Lainnya	296.130.079	1.728.735.739
Jumlah	938.495.186	2.307.033.414

3.9. UTANG BUNGA

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- BYMHD Tabungan	183.477.015	131.736.409
- BYMHD Deposito	424.184.661	463.491.486
- BYMHD Pinjaman	590.591.955	565.639.629
- Bunga Deposito Yg Jatuh Tempo	2.339.216	2.141.014
Jumlah	1.200.592.847	1.163.008.538

3.10. UTANG PAJAK

	31 Des 2022	31 Des 2021
Taksiran PPh Badan Tahun Berjalan	2.691.588.020	2.145.185.460
Uang Muka Pajak	(1.979.944.479)	(1.846.099.933)
PPh Pasal 29 / Kurang Bayar	711.643.541	299.085.527

3.11. SIMPANAN

Terdiri dari:

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Tabungan	4-6.25%	64.813.639.694	55.865.328.497
b. Deposito	4.25-10%	77.963.469.454	68.645.552.953
Jumlah		142.777.109.148	124.510.881.450

Rincian Simpanan

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Tabungan			
- Tabungan Siwajar	4,00%	11.100.195.063	2.273.051.381
- Tabungan Raharja	4,00%	51.246.659.014	51.185.087.545
- Tabungan Sibentang	5.75-6.25%	2.466.785.617	2.407.189.571
Jumlah		64.813.639.694	55.865.328.497

b. Deposito

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Deposito berjangka 1 Bulan	5,25%	30.960.148.019	25.982.735.504
- Deposito berjangka 3 Bulan	6,25%	21.176.077.435	16.880.017.449
- Deposito berjangka 6 Bulan	6,25%	10.114.500.000	11.186.500.000
- Deposito berjangka 12 Bulan	6,25%	15.712.744.000	14.596.300.000

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Jumlah		77.963.469.454	68.645.552.953
Rincian berdasarkan hubungan keterkaitan			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pihak terkait	5,25% - 6,25%	523.000.000	385.000.000
- Pihak tidak terkait	5,25% - 6,25%	77.440.469.454	68.260.552.953
Jumlah		77.963.469.454	68.645.552.953
3.12. SIMPANAN DARI BANK LAIN			
Terdiri dari:			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Tabungan dari Bank Lain	4%	709.582.302	2.516.201.898
b. Deposito dari Bank Lain	6-8%	82.925.000.000	89.900.000.000
Jumlah		83.634.582.302	92.416.201.898
Suku bunga simpanan dari bank lain			
		31 Des 2022	31 Des 2021
a. Tabungan dari Bank Lain	4%	4%	4%
b. Deposito dari Bank Lain	6-8%	6-8%	6-7.75%
Rincian Simpanan dari Bank Lain			
a. Tabungan dari Bank Lain			
Rincian berdasarkan pengelompokan oleh BPR:			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Tabungan Siwajar	4%	-	-
- Tabungan Raharja	4%	709.582.302	2.516.201.898
- Tabungan Sibentang	5.75-6.25%	-	-
Jumlah		709.582.302	2.516.201.898
Rincian berdasarkan hubungan keterkaitan			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pihak terkait		-	-
- Pihak tidak terkait	4%	709.582.302	2.516.201.898
Jumlah		709.582.302	2.516.201.898
b. Deposito dari Bank Lain			
Rincian berdasarkan jangka waktu			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Deposito berjangka 1 Bulan	5,25%	6.700.000.000	7.450.000.000
- Deposito berjangka 3 Bulan	6,25%	33.425.000.000	28.300.000.000
- Deposito berjangka 6 Bulan	6,25%	42.800.000.000	54.050.000.000
- Deposito berjangka 12 Bulan	6,25%	-	100.000.000
Jumlah		82.925.000.000	89.900.000.000
Rincian berdasarkan hubungan keterkaitan			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pihak terkait		-	-
- Pihak tidak terkait	5.25-6.25%	82.925.000.000	89.900.000.000
Jumlah		82.925.000.000	89.900.000.000
3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA			
Terdiri dari:			
		31 Des 2022	31 Des 2021

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

- Pokok Pinjaman	241.961.367.428	199.637.328.876
- Dikurang: Provisi	(1.748.043.464)	(1.527.375.000)
Jumlah	<u>240.213.323.964</u>	<u>198.109.953.876</u>

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Rincian pinjaman (pokok) berdasarkan pemberi pinjaman:

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
a. PT. Bank Oke Indonesia	9,5-10,5%	12.666.666.691	28.333.333.349
b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk	9-10%	35.200.000.255	75.733.333.644
c. PT. Bank BJB, Tbk.	9%	38.250.000.001	2.591.505.510
d. PT. BPD Banten, Tbk	10-10,5%	12.833.333.396	18.233.333.372
e. PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk.	10%	15.551.062.665	22.731.622.800
f. PT. Bank Permata, Tbk	9,75%	36.875.000.009	49.375.000.001
g. PT. BPR Daya Lumbung Asia	9%	18.142.190.399	2.639.200.200
h. PT Bank Danamon	8%	29.688.600.210	-
i. PT. BPD DKI	8,75%	9.840.000.000	-
j. PT. BPD Jatim	9,75%	7.125.000.000	-
k. PT Sarana Multigriya Finansial	4,60-4,75%	6.459.255.736	-
l. PT BPR Lestari Banten	10%	19.330.258.066	-
Jumlah		<u>241.961.367.428</u>	<u>199.637.328.876</u>

Rincian pinjaman dari masing-masing pemberi pinjaman

a. PT. Bank Oke Indonesia / Bank Andara			
	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman Bank Oke 1-1	9,50%	1.666.666.685	5.333.333.348
- Pinjaman Bank Oke 1-2	9,50%	833.333.321	2.833.333.320
- Pinjaman Bank Oke 1-3	9,50%	1.666.666.685	5.666.666.681
- Pinjaman Bank Oke 2	10,50%	8.500.000.000	14.500.000.000
Jumlah		<u>12.666.666.691</u>	<u>28.333.333.349</u>

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT. Bank Oke Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPPK : 088/BOI/BD/2019
 Tanggal : 22 April 2019
 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja - *Installment*
 Plafond : Rp 30.000.000.000
 Suku Bunga : 10,5% p.a
 Jangka Waktu : 60 bulan sejak penarikan pertama
 Agunan : - Gadai deposito pada PT Bank Oke Indonesia atas nama Debitur sebesar 5% dari plafond pinjaman.
 - Fidusia atas piutang milik BPR sebesar 100% dari plafond fasilitas KMK.
- 2) No. SPPK : 094/BOI/OP/IV/2018
 Tanggal : 26 April 2018
 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
 Plafond : Rp 50.000.000.000
 Suku Bunga : 9,5% p.a
 Jangka Waktu : 60 Bulan sejak penarikan pertama
 Agunan : - Gadai deposito pada PT Bank Oke Indonesia atas nama Debitur sebesar 5% dari plafond pinjaman.
 - Fidusia atas piutang milik BPR sebesar 100% dari plafond fasilitas

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

KMK.

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman Niaga Ptk 6 B-2	9,50%	-	100.000.000
- Pinjaman Niaga Ptk 6 B-3	10,00%	-	250.000.019
- Pinjaman Niaga Ptk 6 B-4	9,50%	-	333.333.352
- Pinjaman Niaga Ptk 6 B-5	10%	-	833.333.315
- Pinjaman Niaga Ptk 6 B-6	9,30%	-	999.999.982
- Pinjaman Niaga Ptk6 B7	9,30%	-	666.666.684
- Pinjaman Niaga Ptk6 B8	9,30%	-	833.333.350
- Pinjaman Niaga Ptk6 B9	9,30%	-	916.666.683
- Pinjaman Niaga Ptk7-B1	9,30%	83.333.633	1.083.333.629
- Pinjaman Niaga Ptk7-B2	9,30%	333.333.314	2.333.333.318
- Pinjaman Niaga Ptk7-B3	9,30%	499.999.981	2.499.999.985
- Pinjaman Niaga Ptk7-B4	9,30%	499.999.981	2.499.999.985
- Pinjaman Niaga Ptk7-B5	9,30%	1.000.000.000	4.000.000.000
- Pinjaman Niaga Ptk8-B1	10,00%	1.166.666.649	3.166.666.653
- Pinjaman Niaga Ptk8-B2	10,00%	666.666.684	1.666.666.680
- Pinjaman Niaga Ptk8-B3	10,00%	1.949.999.983	4.549.999.987
- Pinjaman Niaga Ptk9 B-1	9,50%	13.333.333.348	23.333.333.344
- Pinjaman Niaga Ptk9	9,25%	5.666.666.681	9.666.666.677
- Pinjaman Niaga Ptk 9 B-3	9,00%	6.333.333.347	10.333.333.343
- Pinjaman Niaga Ptk 9 B-4	9,00%	3.666.666.654	5.666.666.658
Jumlah		35.200.000.255	75.733.333.644

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPK / Akta : 325/LGL-MSME-JKT/LINKAGE/PK/IV/2019
 Tanggal : 25 April 2019
 Jenis Kredit : Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) - 9
 Plafond : Rp 100.000.000.000
 Suku Bunga : 10,00% p.a
 Jangka Waktu : 72 bulan sejak tanggal ditandatangani
 Agunan : Fidusia atas tagihan BPR kepada debitur dengan cakupan 100% termasuk hasil penjualan agunan yang diberikan debitur kepada BPR.
 Dana Tunai sebesar 1 (satu) kali angsuran per penarikan.
- 5) No. SPK / Akta : 002/ML-2/JKT3/FTA/I/2018
 Tanggal : 23 Januari 2018
 Plafond : Rp 50.000.000.000
 Suku Bunga : 9% p.a
 Jangka Waktu : 108 Bulan
 Agunan : Piutang min 100% dari plafond, dana yang mengendap sebesar 1 kali angsuran, asuransi penjaminan kredit
- 3) No. SPK / Akta : 0108/LGL-MSME-JKT/ML/PK/WPI/III/2016
 Tanggal : 30 Maret 2016
 Plafond : Rp 30.000.000.000
 Suku Bunga : 11,50% p.a

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Jangka Waktu	: 72 Bulan
Agunan	: Piutang min 100% dari plafond, dana yang mengendap sebesar 1 kali angsuran

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk (Lanjutan)

- 4) No. SPK / Akta : 0549/LGL-MSME-JKT/ML/PK/UKMC-TGR/XII/2016
 Tanggal : 19 Desember 2016
 Plafond : Rp 50.000.000.000
 Suku Bunga : 9,50% p.a
 Jangka Waktu : 72 Bulan
 Jatuh Tempo : 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2022
 Agunan : Piutang min 100% dari plafond, Dana tunai sebesar 1x angsuran di tempatkan pada rekening escrow, asuransi penjaminan kredit
- 2) No. SPK / Akta : 187/LGL-SMME-JKT/ML/PK/WPI/VI/2015
 Tanggal : 9 Juni 2015
 Plafond : Rp 25.000.000.000
 Suku Bunga : 14% p.a
 Jangka Waktu : 72 Bulan
 Jatuh Tempo : 9 Juni 2015 s.d. 9 Juni 2021
 Agunan : Piutang min 100% dari plafond, dana yang mengendap sebesar 1 kali angsuran, asuransi penjaminan kredit

c. PT. Bank BJB, Tbk.

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman BJB Balaraja B-1	9,00%	28.500.000.000	-
- Pinjaman BJB Balaraja B-2	9,00%	4.833.333.334	-
- Pinjaman BJB Balaraja B-3	9,00%	4.916.666.667	-
- Pinjaman BJB Balaraja 9-5	9,55%	-	83.333.353
- Pinjaman BJB Balaraja 9-6	9,55%	-	166.666.686
- Pinjaman BJB Balaraja 9-7	9,25%	-	508.474.600
- Pinjaman BJB Balaraja 9-8	9,25%	-	517.241.385
- Pinjaman BJB Balaraja 9-9	9,00%	-	526.315.816
- Pinjaman BJB Balaraja 9-10	9,00%	-	789.473.670
Jumlah		38.250.000.001	2.591.505.510

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank BJB, Tbk adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPPK : 010/DKM-KM2/SPPK/2022
 Tanggal : 5 September 2022
 Plafond : Rp 70.000.000.000
 Jenis Kredit : KMK Installment
 Suku Bunga : 10,00% p.a
 Jangka Waktu : 60 bulan per penarikan fasilitas
 Agunan : Cash Collateral sebesar 1 kali jumlah angsuran dari kewajiban tertinggi angsuran pokok dan bunga.
 Hak tagih (piutang lancar) atas eksisting debitur BPR senilai minimal

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

100% dari outstanding fasilitas kredit.

- 2) No. SPK / Akta : 200
 Tanggal : 17 Maret 2016
 Plafond : Rp 35.000.000.000
 Suku Bunga : 10,75% p.a
 Jangka Waktu : 66 Bulan
 Jatuh Tempo : 17 Maret 2016 s.d. 17 September 2021
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Cash Collateral sebesar 1 kali angsuran, asuransi penjaminan kredit

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

c. PT. Bank BJB, Tbk. (Lanjutan)

- 3) No. SPK / Akta : 390
 Tanggal : 22 September 2016
 Plafond : Rp 70.000.000.000
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Jangka Waktu : 66 Bulan
 Jatuh Tempo : 22 September 2016 s.d. 22 Maret 2022
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Cash Collateral sebesar 1 kali angsuran

d. PT. BPD Banten, Tbk

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman Bank Banten 1-1	10%	1.250.000.015	2.250.000.011
- Pinjaman Bank Banten 1-2	10%	1.333.333.348	2.333.333.344
- Pinjaman Bank Banten 1-3	10%	1.500.000.014	2.500.000.010
- Pinjaman Bank Banten 2-1	10,25%	1.000.000.010	1.400.000.006
- Pinjaman Bank Banten 3-1	10,50%	3.750.000.005	4.750.000.001
- Pinjaman Bank Banten 3-2	10,50%	4.000.000.004	5.000.000.000
Jumlah		12.833.333.396	18.233.333.372

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT. BPD Banten, Tbk adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPK / Akta : 29
 Tanggal : 23 Agustus 2018
 Plafond : Rp 15.000.000.000
 Suku Bunga : 10% - 10,25% p.a
 Jangka Waktu : 66 Bulan
 Jatuh Tempo : 23 Agustus 2018 s.d. 23 Februari 2024
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Cash Colateral Minimal sebesar Rp 380.000.000,-
- 2) No. SPK / Akta : 367
 Tanggal : 13 Juni 2019
 Plafond : Rp 25.000.000.000
 Suku Bunga : 10,5% p.a
 Jangka Waktu : 66 Bulan
 Jatuh Tempo : 23 Agustus 2018 s.d. 13 Desember 2024
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Cash Colateral Minimal sebesar Rp 640.000.000,-

d. PT. BPD Banten, Tbk (Lanjutan)

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

3) No. SPK / Akta	: B.008
Tanggal	: 13 September 2021
Plafond	: Rp 10.000.000.000
Suku Bunga	: 10,5% p.a
Jangka Waktu	: 66 Bulan
Jatuh Tempo	: 13 September 2021 s.d. 13 Maret 2027
Agunan	: Piutang min 100% dari Outstanding, Cash Colateral Minimal sebesar Rp 255.000.000,-

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

e. PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman B-1	10%	7.618.364.864	11.223.542.359
- Pinjaman B-2	10%	7.932.697.801	11.508.080.441
		<u>15.551.062.665</u>	<u>22.731.622.800</u>

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank JTrust Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPK / Akta : 16
 Tanggal : 27 November 2020
 Plafond : Rp 15.000.000.000
 Suku Bunga : 10% p.a
 Jangka Waktu : 48 Bulan
 Jatuh Tempo : 27 November 2020 s.d. 27 Oktober 2024
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Sinking Fund minimal satu kali angsuran
- 2) No. SPK : 238/SPK/BJI-JAK/B-Link/X/2020
 Tanggal : 23 Oktober 2020
 Plafond : Rp 30.000.000.000
 Suku Bunga : 10% p.a
 Jangka Waktu : 54 bulan sejak tanggal efektif fasilitas kredit
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Sinking Fund minimal satu kali angsuran

f. PT. Bank Permata, Tbk

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Batch 1	9,75%	7.083.333.338	9.583.333.334
- Batch 2	9,75%	7.291.666.671	9.791.666.667
- Batch 3	9,75%	22.500.000.000	30.000.000.000
		<u>36.875.000.009</u>	<u>49.375.000.001</u>

Fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Permata, Tbk adalah sebagai berikut:

- 1) No. SPK / Akta : 515/BP/LOO/CRC/-JKT/WB/IX/2021
 Tanggal : 20 September 2021
 Plafond : Rp 50.000.000.000
 Suku Bunga : 9,75% fixed
 Jangka Waktu : 60 Bulan
 Agunan : Cash Collateral sebesar 10% dari limit (per pencairan) sudah diikat sempurna.

g. PT. BPR Daya Lumbung Asia

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman 1	9,00%	13.623.280.950	2.639.200.200
- Pinjaman B-3	9,00%	4.518.909.449	-
		<u>13.623.280.950</u>	<u>2.639.200.200</u>
1) No. SPK / Akta	: 55		
Tanggal	: 21 Desember 2020		
Plafond	: Rp 5.000.000.000		
Suku Bunga	: 10,75% p.a		
Jangka Waktu	: 24 Bulan		
Jatuh Tempo	: 21 Januari 2021 s.d. 21 Desember 2022		
Agunan	: Piutang min 100% dari Outstanding, Sinking Fund minimal satu kali angsuran		

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

g. PT. BPR Daya Lumbung Asia (Lanjutan)

- 2) No. SP3K : 0130/BPR-DLA/KREDIT/IX/2022
 Tanggal : 27 September 2022
 Plafond : Rp 4.700.000.000
 Suku Bunga : 4,91% flat p.a, setara 9% effective p.a.
 Jangka Waktu : 60 Bulan
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Sinking Fund minimal satu kali angsuran
- 3) No. SP3K : 0071/BPR-DLA/KREDIT/II/2022
 Tanggal : 20 Mei 2022
 Plafond : Rp 15.000.000.000
 Suku Bunga : 4,91% flat p.a, setara 9% effective p.a.
 Jangka Waktu : 60 Bulan
 Agunan : Piutang min 100% dari Outstanding, Sinking Fund minimal satu kali angsuran

h. PT Bank Danamon

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Batch-1	8,00%	19.688.600.210	-
- Batch-2	8,00%	10.000.000.000	-
		<u>29.688.600.210</u>	<u>-</u>
1) No. SPK	: B.OL/238/XI/2022		
Tanggal	: 16 November 2022		
Plafond	: Rp 30.000.000.000		
Suku Bunga	: 8,00%		
Jangka Waktu	: 60 Bulan		

i. PT BPD DKI

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman-1	8,75%	9.840.000.000	-
		<u>9.840.000.000</u>	<u>-</u>
1) No. SPPK	: 359/SPPK/KRI/XI/2022		
Tanggal	: 30 November 2022		
Plafond	: Rp 25.000.000.000		
Suku Bunga	: 8,75% p.a.		
Jangka Waktu	: 12 bulan sejak tanggal perjanjian		

j. PT BPD Jatim

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman-1	9,75%	7.125.000.000	-
		7.125.000.000	-
1) No. SPPK	: 061/217/JKT/KRD/SPPK		
Tanggal	: 15 Juni 2022		
Plafond	: Rp 7.500.000.000		
Suku Bunga	: 9,75% effective p.a.		
Jangka Waktu	: 120 bulan		

3.13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

k. PT Sarana Multigriya Finansial

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman-1	5,50% - 7,50%	3.520.498.583	-
- Pinjaman-2	5,50% - 7,50%	2.938.757.153	-
		6.459.255.736	-
1) No. SPK	: S-1172/DIR/SMF/IV/2022		
Tanggal	: 18 April 2022		
Plafond	: Rp 10.000.000.000		
Suku Bunga	: 5,50% s.d.7,5% p.a. <i>fixed</i> dan <i>effective</i>		
Jangka Waktu	: 1 (satu) tahun		

l. PT BPR Lestari Banten

	Suku Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
- Pinjaman-1		19.330.258.066	-
		19.330.258.066	-

3.14. KEWAJIBAN IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan menerapkan SAK-ETAP Bab 23 mengenai "Imbalan kerja". Kewajiban imbalan pascakerja sejak jasa diberikan oleh karyawan hingga tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", yang dihitung oleh aktuaris independen, sebagai berikut:

	31 Des 2022	31 Des 2021
Asumsi Aktuarial		
Tingkat Diskonto	7,56%	7,15%
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%
Usia Pengunduran Diri	56 Tahun	56 Tahun
Rekonsiliasi Perubahan pada Aset /Kewajiban yang Diakui di Neraca		
(Kewajiban)/Kekayaan Awal Tahun	28.886.461	153.255.897
(Beban) Pendapatan	472.383.095	(909.184.548)
Pembayaran Manfaat Realisasi	70.347.079	413.477.683
luran Perusahaan	-	371.337.429
Kekayaan Akhir Tahun	571.616.635	28.886.461

Berdasarkan perhitungan aktuaris tersebut, BPR memiliki aset bersih pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp.571.616.635 dan Rp.28.886.461,-. BPR tidak mengakui aset tersebut dalam laporan keuangan, karena seluruh kelebihan dari manfaat program pada saat karyawan pensiun akan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan.

	31 Des 2022	31 Des 2021
Perubahan pada Aset /Kewajiban yang Diakui di Neraca		

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

3.15. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Dana Tenaga Kerja	3.236.617	3.236.617
- Dana CSR	243.067.085	-
- Dana Kesejahteraan	-	79.035.798
Jumlah	246.303.702	82.272.415

3.16. MODAL

Berdasarkan akta nomor 23 notaris Harsono, SH, tanggal 23 Desember 2020, tentang pendirian perseroan terbatas PT Bank Perkreditank Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 23 Desember 2020, Moda dasar BPR sebesar Rp.250.000.000.000,- yang terbagi atas 250.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.1.000,-. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor 28,66% atau sejumlah 71.650.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp.71.650.000.000,-.

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Modal dasar	250.000.000.000	250.000.000.000
- Dikurang: Modal belum disetor	(178.350.000.000)	(178.350.000.000)
Jumlah Modal Disetor	71.650.000.000	71.650.000.000

Struktur Kepemilikan Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan
1. Pemerintah Kabupaten Tangerang	55.000.000	55.000.000.000	76,76%
2. Pemerintah Provinsi Banten	15.000.000	15.000.000.000	20,94%
3. PT. Bank Jabar Banten, Tbk.	1.050.000	1.050.000.000	1,47%
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat	600.000	600.000.000	0,84%
Jumlah	71.650.000	71.650.000.000	100,00%

3.17. SALDO LABA

	31 Des 2022	31 Des 2021
a. Cadangan		
- Cadangan Umum	16.210.900.925	15.450.335.104
- Cadangan Tujuan	10.417.025.262	9.656.459.440
Jumlah	26.627.926.187	25.106.794.543
b. Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya:		
Salddo Laba/(Rugi) Tahun-tahun lalu	7.605.658.217	8.791.804.254
Dividen dan Cadangan	(7.605.658.217)	(8.791.804.254)
Salddo Laba/(Rugi) Tahun-tahun lalu	-	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	9.542.903.632	7.605.658.217
Saldo Laba Belum ditentukan Penggunaannya	9.542.903.632	7.605.658.217

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Saldo Laba/(Rugi) Tahun-tahun lalu	-	-
Labas/(Rugi) Tahun Berjalan	9.542.903.632	7.605.658.217
Saldo Laba Belum ditentukan Penggunaannya	9.542.903.632	7.605.658.217

3.18. DIVIDEN

Dividen yang dibagikan pada tahun 2022 atas laba setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp.7.605.658.217, dan dividen yang dibagikan pada tahun 2021 atas laba setelah pajak tahun 2020 sebesar Rp.8.791.804.254, dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021	2022	2021
Jumlah Laba Tahun Lalu yang Dibagikan			7.605.658.217	8.791.804.254
Pembagian Laba:				
- Pemegang Saham	: 55,0%	50,0%	4.183.112.019	4.395.902.127
- Cadangan Umum	: 10,0%	10,0%	760.565.822	879.180.425
- Cadangan Tujuan	: 10,0%	10,0%	760.565.822	879.180.425
- CSR	: 3,0%	0,0%	228.169.747	-
- Tantiem	: 4,0%	0,0%	304.226.329	-
- Jasa Produksi	: 8,0%	12,0%	608.452.657	1.055.016.510
- Dana Kesejahteraan	: 10,0%	12,0%	760.565.822	1.055.016.510
- Dana Pembinaan	: 0,0%	6,0%	-	527.508.255

4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN LABA RUGI

4.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

	2022	2021
a. Pendapatan Bunga :		
Bunga Simpanan Pada Bank Lain:		
- Pendapatan Bunga Giro	838.155.871	562.381.010
- Pendapatan Bunga Tabungan	166.807.401	183.966.579
- Pendapatan Bunga Deposito	1.557.715.915	1.253.156.892
Jumlah	2.562.679.187	1.999.504.480
Bunga Kontraktual :		
- Kredit Yang Diberikan	74.633.659.923	75.025.779.377
Jumlah	74.633.659.923	75.025.779.377
Jumlah Bunga Kontraktual	77.196.339.110	77.025.283.857
- Provisi & Biaya Transaksi	4.882.689.775	4.675.693.774
Jumlah Pendapatan Bunga	82.079.028.885	81.700.977.631
b. Beban Bunga :		
Beban Bunga Bank lain :		
- Beban Bunga Tabungan	28.957.727	15.170.249
- Beban Bunga Deposito	5.598.007.357	5.296.859.061
- Beban Bunga & Provisi Pinjaman Diterima	19.649.061.818	19.829.451.549
Jumlah	25.276.026.902	25.141.480.858
Beban Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank :		
- Beban Bunga Deposito	4.671.142.697	4.540.142.000

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

- Beban Bunga Tabungan	1.824.897.316	1.523.065.875
Jumlah	6.496.040.013	6.063.207.875
- Premi Asuransi LPS	446.679.516	333.913.164
Jumlah Beban Bunga	32.218.746.431	31.538.601.897
Pendapatan Bunga Neto [A] = [a] + [b]	49.860.282.454	50.162.375.734

4.1. PENDAPATAN OPERASIONAL (Lanjutan)		
c. <u>Pendapatan Operasional Lainnya :</u>		
- Denda / Penalty	113.002.776	141.709.434
- Administrasi Pinjaman	28.719.520	85.485.961
- Administrasi Tabungan	162.218.500	120.980.000
- Penutupan Rekening	65.192.666	79.622.225
- Administrasi Ganti Buku	-	170.000
- Administrasi Penarikan Deposito	38.044.988	29.770.608
- Penerimaan dari Kredit Hapusbuku	391.371.725	251.829.832
- Pemulihan PPAP	8.175.468.266	1.971.921.226
- Lainnya	43.132.243	18.234.561
Jumlah [B]	9.017.150.685	2.699.723.847
Jumlah Pendapatan Operasional [A + B]	58.877.433.139	52.862.099.580

4.2. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN / PENYUSUTAN	2022	2021
- Beban Penyisihan Kerugian	6.262.266.948	4.447.736.852
- Beban Penyusutan & Amortisasi	1.295.011.050	1.407.889.735
Jumlah	7.557.277.998	5.855.626.588

4.3. BEBAN PEMASARAN	2022	2021
- Promosi Produk	673.138.556	270.588.145
- Sponsorship	82.073.000	23.300.000
- Iklan	7.500.000	23.830.000
- Hadiah Nasabah	6.500.000	-
Jumlah	769.211.556	317.718.145

4.4. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	2022	2021
- Biaya Tenaga Kerja	28.034.379.075	26.598.583.522
- Pendidikan dan Pelatihan	502.839.335	286.445.776
- Premi Asuransi	1.973.335.345	1.926.537.690
- Sewa	1.664.585.433	2.193.274.829
- Pajak-Pajak (Tidak termasuk PPh)	59.681.025	66.562.715
- Pemeliharaan dan Perbaikan	314.174.837	246.414.630
- Barang dan Jasa	3.119.525.894	2.717.736.979
- Biaya Operasional Lainnya	2.721.976.203	2.586.531.039

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Jumlah	38.390.497.147	36.622.087.180
--------	----------------	----------------

4.5. PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL

Pendapatan Non-Operasional		
	2022	2021
- Selisih Kas Lebih	45.229	48.062
- Fee Based Asuransi	216.707.405	167.800.566
- Keuntungan Penjualan Aset Tetap	275.000.000	-
- Lainnya	30.094.298	25.000.399
Jumlah	521.846.932	192.849.027

4.5. PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL

Beban Non-Operasional		
	2022	2021
- Iuran-luran	(276.884.224)	(214.834.310)
- Sumbangan Lainnya	(139.945.696)	(248.049.695)
- Denda Sanksi Administrasi	(5.590.000)	(11.860.000)
- Lainnya	(25.381.799)	(33.929.013)
Jumlah	(447.801.719)	(508.673.018)

4.6. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

	2022	2021
Laba sebelum pajak penghasilan	12.234.491.652	9.750.843.677
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	12.234.491.000	9.750.843.000
Pajak Terhutang:		
Fasilitas	-	-
Non Fasilitas	2.691.588.020	2.145.185.460
Total	2.691.588.020	2.145.185.460
Kredit Pajak:		
- PPh Pasal 25	(1.979.944.479)	(1.846.099.933)
PPh 29 / Kurang Bayar	711.643.541	299.085.527

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, BPR menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ke kantor pajak atas dasar self-assessment. Kantor pajak berhak memeriksa atau mengoreksi pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pajak terutang, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

5. PENGUNGKAPAN LAINNYA

5.1. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	31 Des 2022	31 Des 2021
<u>Komitmen</u>		
Aset / Tagihan Komitmen		
- Fasilitas Pinjaman yang diterima yang belum ditarik	58.557.476.483	-
	58.557.476.483	-
Kewajiban Komitmen:		
- Fasilitas Kredit yang belum ditarik	6.740.127.699	5.174.000.000
	6.740.127.699	5.174.000.000

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Kontinjensi

Aset / Tagihan Kontinjensi:

- Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	4.504.937.962	4.524.670.592
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	12.857.375.350	11.263.891.610
	17.362.313.312	15.788.562.202

Kewajiban Kontinjensi:

BPR tidak memiliki kewajiban kontinjensi

5.2. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

5.2. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (Lanjutan)

Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai

	31 Des 2022	31 Des 2021
- Modal Inti	103.049.378.003	100.559.623.653
- Modal Pelengkap	992.553.211	1.776.481.349
- Jumlah Modal	104.041.931.213	102.336.105.002
- ATMR	432.479.859.936	448.531.717.195
- Rasio KPMM (CAR)	24,06%	22,82%
- Kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR	-	-
- Rasio Modal Inti	23,83%	22,42%
- Kekurangan modal inti untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR	-	-

Keterangan: Rincian Perhitungan KPMM dan ATMR disajikan dalam Lampiran 2 dan 3 dari Laporan ini.

BPR telah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Modal Inti Minimum berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015, BPR telah memenuhi Kewajiban untuk memenuhi Modal Inti Minimum sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dan juga telah memenuhi kewajiban penyediaan Modal Inti Minimum sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2024 (Pasal 13 ayat 2).

5.3. MANAJEMEN RISIKO

BPR menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Risiko-risiko yang dikelola oleh BPR berdasarkan POJK tersebut terdiri dari:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Operasional
- c. Risiko Kepatuhan
- d. Risiko Likuiditas
- e. Risiko Reputasi, dan
- f. Risiko Strategik

BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Dan berdasarkan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015, BPR diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko atas seluruh Risiko tersebut diatas. BPR telah berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Pengelolaan Risiko yang telah diupayakan oleh BPR adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan berbasis prinsip “empat mata” (“four eyes principle”) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.

BPR telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan (KDP) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan BPR, PBI, POJK serta sesuai dengan Praktik Bank Perkreditan Rakyat Nasional. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan database perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.

5.3. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

BPR telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis stress testing (kondisi terburuk) terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil stress testing tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BPR melakukan analisis stress testing ini secara berkala. Stress testing bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “stressful condition” sehingga BPR dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “contingency plan”.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, BPR telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 melalui Memorandum Prosedur Perkreditan perihal Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 2020. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak Covid-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi. Relaksasi dilakukan khusus untuk debitur dan sektor yang terdampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Direksi Nomor 5/PDIR/BPR-KR/III/2020 yang kemudian di cabut dan digantikan dengan Peraturan Direksi Nomor 10/PDIR/BPR-KR/X/2020.

BPR telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling);
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), meliputi :
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Penurunan suku bunga kredit;
 - 5) Penundaan pembayaran pokok; dan/atau
 - 6) Penghapusan dan/atau pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda.
- c. Penataan kembali (restructuring)

Dalam pelaksanaannya, BPR akan memperketat assesment bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi untuk menghindari moral hazard dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Pemberian stimulus hanya dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPR. Penetapan debitur yang memenuhi kriteria tersebut juga melibatkan unit risk management sebagai pihak yang independent. Dalam pelaksanaan pemberian stimulus dan untuk menghindari adanya free rider (moral hazard), BPR selalu mengacu pada regulasi.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan debitur-debitur BPR yang terdampak Covid-19 dapat terbantu dan kualitas portofolio BPR dapat tetap dijaga dengan baik.

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

Dalam kaitan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung, BPR melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portfolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan early warning signal dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi, serta akan menyusun regulasi yang berhubungan dengan aktivitas yang dapat memitigasi risiko.

Risiko Operasional

Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan BPR untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam manajemen risiko suatu Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR telah mengimplementasikan Risk Control Self Assessment (RCSA) ke seluruh Divisi atau Unit Kerja yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan risk culture (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan risk awareness (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.

BPR juga telah memiliki database kasus/ kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja. Tujuan utama diimplementasikannya database ini adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan dipergunakan BPR dalam memperhitungkan alokasi beban modal (capital charge) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BPR.

5.3. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Operasional (Lanjutan)

Selain itu database ini juga digunakan BPR untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/ memitigasi risiko kerugian operasional, yang mungkin timbul di kemudian hari. BPR telah mengimplementasikan Key Risk Indicator (KRI) yaitu pedoman yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (early warning sign) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit

Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, BPR telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BPR. Satuan Kerja juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan triwulan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

BPR juga telah memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, BPR memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

Risiko Likuiditas

Dalam melakukan manajemen Risiko Likuiditas, Bank memastikan kecukupan dana dan menetapkan limit-limit sesuai ketentuan Regulator maupun ketentuan internal Bank. Bank memiliki batasan cadangan likuiditas dalam bentuk limit safety level, yaitu proyeksi cadangan likuiditas Bank untuk tiga bulan kedepan yang dipantau secara berkala.

Risiko Reputasi

Setiap unit kerja di Bank wajib menjaga reputasi Bank sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan Risiko Reputasi memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya, sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Bank telah memiliki standar layanan nasabah yang dimonitor secara berkala, dan contact center untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan keluhan maupun inquiry mengenai produk dan layanan

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah)

Risiko Strategik

Dalam pengelolaan Risiko Strategik, Bank secara rutin melakukan review kinerja dan mengevaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, apabila diperlukan.

5.4. LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PENGALIHAN IZIN USAHA

Sebagaimana dijelaskan pada catatan nomor 1.e, BPR telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/KR.011/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal persetujuan permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

5.4. LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PENGALIHAN IZIN USAHA (Lanjutan)

Ringkasan Neraca BPR pada tanggal pengalihan izin usaha tanggal 2 Maret 2021 adalah sebagai berikut	
Uraian	2 Maret 2021
Aset	490.572.421.106
Kewajiban	391.301.718.805
Ekuitas	
Modal Disetor	71.650.000.000
Saldo Laba ex. PD BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang:	
- Saldo laba s.d. 31 Desember 2020	26.442.389.342
- Laba 1 Januari s.d. 1 Maret 2021	1.178.312.959

Dengan dialihkannya izin usaha tersebut, maka seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas PD BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dialihkan kepada PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun oleh BPR dengan badan usaha baru, melanjutkan laporan keuangan badan hukum sebelumnya. Laporan laba rugi dan arus kas disusun dan disajikan untuk satu tahun penuh (selama 12 bulan). Perolehan laba tahun 2021 selama 12 bulan sebesar Rp.7.605.658.217 terdiri dari laba periode 1 Januari s.d. 1 Maret 2021 (sebelum pengalihan izin usaha), dengan perolehan laba sebesar Rp.1.178.312.959, dan periode 2 Maret s.d. 31 Desember 2021 (setelah pengalihan izin usaha) dengan perolehan laba sebesar Rp.6.427.345.258.

5.5. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen BPR bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, dan telah menyelesaikan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 pada tanggal 6 Maret 2023.

5.6. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi yang disajikan pada lampiran 1, 2 dan 3 merupakan informasi keuangan tambahan BPR, yang menyajikan perhitungan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), serta Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN 1 :

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)						
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA						
TANGGAL 31 DESEMBER 2022						
(dinyatakan dalam Rupiah)						
KETERANGAN	TANGGAL 31 DESEMBER 2022					
	L (2)	DP (3)	KL (4)	D (5)	M (6)	Jumlah (7)
1. Penempatan pada bank lain	126.208.167.511	-	-	-	-	126.208.167.511
2. Kredit yang diberikan	413.739.417.972	25.929.464.741	2.134.810.763	2.811.011.891	11.679.540.487	456.294.245.855
a. Kepada pihak terkait	2.129.709.609					2.129.709.609
b. Kepada pihak tidak terkait	411.609.708.364	25.929.464.741	2.134.810.763	2.811.011.891	11.679.540.487	454.164.536.246
3. Jumlah aktiva produktif	539.947.585.484	25.929.464.741	2.134.810.763	2.811.011.891	11.679.540.487	582.502.413.367
4. NPL net (%)						1,80%
5. Rasio KPMM (%)						24,06%
6. Loan to Deposit Ratio/LDR (%)						86,12%
7. Return on Asset/ROA (%)						2,22%
8. PPAP (%)						100,00%
9. BOPO (%)						86,65%
10. Cash Ratio (%)						63,29%

LAMPIRAN 2

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM 31 DESEMBER 2022 (dinyatakan dalam Rupiah)			
KOMPONEN PERMODALAN	BOBOT (%)	JUMLAH KOMPONEN	JUMLAH KOMPONEN BOBOT
I MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1 Modal disetor	100%	71.650.000.000	71.650.000.000
1 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)	100%		-
1.1.2.2 Dana setoran modal ekuitas	100%		-
1.1.2.3 Modal sumbangan	100%		-
1.1.2.4 Cadangan umum	100%	16.210.900.925	16.210.900.925
1.1.2.5 Cadangan tujuan	100%	10.417.025.262	10.417.025.262
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	100%		-
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun berjalan	100%	-	-
1.1.2.7.1 Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
1.1.2.7.2 Taksiran hutang PPh dalam hal laba -/-			
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (maksimum 50% setelah setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	50%	9.542.903.632	4.771.451.816
1.1.2.9 Pajak tangguhan -/-	100%		-
1.1.2.10 Goodwill -/-	100%		-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah, bangunan, dan/atau rumah -/-			-
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	50%		-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 3 tahun s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	75%		-
1.1.2.11.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	100%		-
1.1.2.12 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya -/-			-
1.1.2.12.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	50%		-
1.1.2.12.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	100%		-
Sub Total cadangan Tambahan Modal			-
Sub Total Modal Inti Utama			103.049.378.003
I.2 Modal Inti Tambahan	100%	-	-
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)			103.049.378.003
II MODAL PELENGKAP			992.553.211
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi 50% dari modal inti)	Max 50% dari modal inti	-	-
II.2 Keuntungan revaluasi tetap	100%	-	-
II.3 PPAP Umum Yang Wajib Dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum)	Max 1,25% dari modal inti	992.553.211	992.553.211
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (II.1 + II.2 + II.3))			992.553.211
Jumlah Modal (I+II)			104.041.931.213
Rasio KPMM (CAR)	Jumlah Modal ATMR		24,06%
Rasio Modal Inti	Jumlah Modal Inti ATMR		23,83%

LAMPIRAN 3

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO 31 DESEMBER 2022				
NO.	KOMPONEN	JUMLAH KOMPONEN	BOBOT RISIKO (%)	JUMLAH ATMR
1	Kas	4.210.524.500	0	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	0	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-	0	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	0	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR	-	15%	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	125.568.668.926	20%	25.113.733.785
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	2.105.178.260	20%	421.035.652
	a. Kredit kepada bank lain	2.105.178.260	-	-
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	-	-
	c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	-	-
	d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	-	-
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	-	20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	8.322.661.386	30%	2.496.798.416
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	50%	-
	a. Kredit kepada BUMN/BUMD	-	-	-
	b. Bagian Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko	-	-	-
11	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	95.451.721.608	50%	47.725.860.804
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	-	50%	-
13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	1.327.108.448	70%	928.975.913
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.772.991.928	70%	3.341.094.349
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	327.011.816.950	100%	327.011.816.950
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	4.019.396.618	100%	4.019.396.618
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	113.136.335	-	113.136.335
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	3.906.260.283	-	3.906.260.283
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	17.401.595.164	100%	17.401.595.164
18	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	100%	-
19	Aset lainnya selain tersebut di atas	4.019.552.284	100%	4.019.552.284
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum	594.211.216.071		432.479.859.936
	Selisih lebih PPAP Umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/-			-
	Jumlah ATMR			432.479.859.936

Bagian Ketiga

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA



Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, BPR wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lain yang meliputi :

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1.1. Standar akuntansi

Laporan Keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun Buku 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR);

1.2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

1.2.1. Kebijakan konsep dasar pengukuran

- a. **Biaya historis**; dimana aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. **Biaya kini**; dimana aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar, bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Utang dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
- c. **Nilai realisasi**; dimana aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Utang dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
- d. **Nilai sekarang (*present value*)**; dimana nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukan perhitungan/saat ini sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- e. **Nilai wajar**; dimana jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara

pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

- f. **Dasar akrual**, dimana laporan keuangan, kecuali laporan arus kas disusun dengan menggunakan dasar akrual. Pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban, ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

1.2.2. Penyusunan laporan keuangan

Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. **Aset** adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh BPR;
- b. **Kewajiban** adalah merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR yang mengandung manfaat ekonomi;
- c. **Ekuitas** adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.

1.2.3. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari BPR sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. **Pendapatan (income)** adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal;
- b. **Beban (expenses)** adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal;
- c. **Pengakuan pendapatan dan beban** dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban.

1.2.4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan

dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- a. **Aktivitas operasi (operating)** adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
- b. **Aktivitas investasi (investing)** adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- c. **Aktivitas pendanaan (financing)** adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR.
- d. **Kas terdiri atas:**
 - 1. Kas dan kas dalam valuta asing;
 - 2. Giro pada bank lain;
 - 3. Tabungan pada bank atau BPR lain.
- e. **Setara kas, antara lain:**
 - 1. SBI dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 2. Deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- f. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

1.2.5. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan.

Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi :

- a. Modal saham, misalnya penambahan modal saham;
- b. Laba/rugi yang belum direalisasi dalam Sertifikat Bank Indonesia;
- c. Surplus revaluasi aset tetap;
- d. Dana setoran modal - ekuitas;
- e. Saldo laba (laba ditahan).

1.3. Kebijakan akuntansi BPR

1.3.1. Pengakuan dalam laporan keuangan

- a. **Aset;** diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi;
- b. **Kewajiban;** diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal;
- c. **Pendapatan;** pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal;
- d. **Beban;** pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengakuan dan pengukuran beban dilakukan sebagai berikut :
 1. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.
 2. Premi dibayar dimuka dalam rangka program penjaminan diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut;
 3. Beban administrasi umum diakui:
 - a. seluruhnya pada periode terjadinya; atau
 - b. sebesar alokasi proporsional selama beberapa periode untuk beban administrasi umum yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan.
- e. **Laba rugi;** Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan

yang terpisah tidak diperlukan.

1.3.2. Kredit yang diberikan

- a. Pengakuan dan pengukuran terhadap nilai buku awal pada saat penyaluran kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR;
- b. Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi;
- c. Penghentian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dilunasi atau agunan diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit;
- d. Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima;
- e. Bunga kredit non-performing diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

1.3.3. Penyisihan kerugian kredit

- a. Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit;
- b. Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan;
- c. Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan, antara lain:
 1. Kualitas kredit
 2. Nilai agunan yang tersedia, yang diperhitungkan, antara lain, berdasarkan jenis agunan, jenis pengikatan agunan, harga pasar dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen.
- d. Jumlah minimal penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk BPR ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor : 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut :
POJK no : 33/POJK.03/2018 BAB III PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF Pasal 16 :

1. BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif.
2. PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
3. PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
4. Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. SBI; dan
 - b. bagian dari Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
5. Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
 - b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021.

- c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.
- e. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar :
 - 1. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia; 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
 - 2. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;
 - 3. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - 4. 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - 5. 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
 - 6. 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian tempat usaha/los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat

lainnya yang berwenang;

7. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
9. 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit;
10. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

1.3.4. Kas dan setara kas

- a. Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah atau yang setara kas dan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
- b. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan;
- c. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain;
- d. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes) dan mata uang emas;
- e. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

1.3.5. Aset tetap dan inventaris serta penyusutan

- a. Aset Tetap dan Inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

- b. Aset tetap dan inventaris, antara lain, meliputi:
 - 1. Tanah.
 - 2. Bangunan.
 - 3. Inventaris (peralatan, perlengkapan dan kendaraan);
- c. Harga perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari :
 - 1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
 - 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
 - 3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi (jika ada).
- d. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya;
- e. Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan secara sistematis selama umur manfaatnya.
- f. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana mestinya
- g. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

1.3.6. Pengakuan pendapatan bunga

- a. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga;
- b. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga;
- c. Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing;
- d. Pendapatan Bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:

- 1) Kredit yang termasuk kategori performing diakui secara akrual;
 - 2) Kredit yang termasuk kategori non-performing (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) diakui secara kas;
- e. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit non-performing harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok dan jika masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga;
- f. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka BPR :
1. membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur;
 2. bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- g. Apabila terjadi kesalahan pada penggolongan kualitas kredit pada periode yang lalu dan baru diketahui pada periode berjalan dan kesalahan tersebut bersifat material, maka dilakukan koreksi pada periode terjadinya kesalahan pada pos-pos yang terkait.
- h. Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi pada atau sebelum tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian (adjusting subsequent event). Penyesuaian dilakukan atas pos-pos yang terkait.
- i. Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi setelah tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan tidak perlu melakukan penyesuaian atas pos-pos terkait periode yang lalu.

1.3.7. Pengakuan beban bunga

- a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman;
- b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan,

cash back dan hadiah deposito berjangka;

- c. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana;
- d. Utang bunga :
 - 1. Utang Bunga merupakan kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar;
 - 2. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.
 - 3. Utang bunga antara lain terdiri dari:
 - a. Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga);
 - b. Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah; dan
 - c. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.
 - 4. Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.
- e. Beban bunga tabungan :
 - 1. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga;
 - 2. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut, misalnya hadiah, cash back yang dapat diatribusikan secara langsung serta premi penjaminan simpanan. Hadiah dan cash back hanya dapat diatribusikan untuk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu;
 - 3. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai

- penambah nominal tabungan; dan
4. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.
- f. Beban bunga deposito :
1. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito;
 2. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai Beban Bunga; dan
 3. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga;
- g. Beban bunga pinjaman diterima
1. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga; dan
 2. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang Bunga.

1.3.8. Pajak penghasilan

- a. Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode;
- b. Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode;
- c. Pajak penghasilan bisa merupakan pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan kini. Sehingga beban pajak penghasilan yang timbul merupakan beban pajak penghasilan kini;
- d. Beban Pajak Kini dihitung berdasarkan laba fiskal.;
- e. Beban Pajak Penghasilan diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan;
- f. Beban Pajak Penghasilan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

1.3.9. Imbalan kerja

- a. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja;
- b. Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja;

- c. Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:
 - 1. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek;
 - 2. Kewajiban imbalan pascakerja;
 - 3. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan
 - 4. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.
- d. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya;
- e. Kewajiban imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya;
- f. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya;
- g. Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat:
 - 1.) Keputusan BPR untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau
 - 2.) Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu;
- h. Imbalan kerja termasuk imbalan kerja untuk direksi dan komisaris;
- i. Pos Kewajiban Imbalan Kerja yang dimaksud tidak termasuk imbalan kerja jangka pendek yang termasuk dalam kewajiban segera;
- j. Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu;
- k. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan;
- l. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*);
- m. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).

2. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

2.1. Pertumbuhan Aset

Aset total BPR Kerta Raharja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,37% atau sebesar Rp54.291.991 ribu yaitu dari Rp523.593.955 ribu di tahun 2021 menjadi sebesar Rp577.885.946 ribu pada akhir tahun 2022.

2.2. Rincian penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar - 6,78% atau sebesar Rp9.163.722 ribu dari sebesar Rp135.371.890 ribu pada akhir tahun 2021 menjadi Rp126.208.168 ribu pada akhir tahun 2022 berupa penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

dalam ribuan rupiah

RINCIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	%
Penempatan Giro	70,001,094	62,307,521	12.35%
Penempatan Tabungan	18,929,928	17,059,369	10.96%
Penempatan Deposito	37,277,146	56,005,000	-33.44%
Jumlah	126,208,168	135,371,890	-6.77%

2.3. Rincian kredit yang diberikan

Seiring dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana, maka bank melakukan penyaluran dana yang sebagian besar disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan yang pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp58.802.752 ribu atau sebesar 14,79% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar Rp397.491.493 ribu menjadi Rp456.294.246 ribu pada tahun 2022 dengan jumlah Debitur sebanyak 8.730 rekening.

Adapun rincian kredit yang diberikan pada tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

a. Kredit berdasarkan jenis penggunaan;

dalam ribuan rupiah

Jenis Penggunaan	Tahun 2022		Tahun 2021	
	NOA	Baki Debet	NOA	Baki Debet
Modal Kerja	788	20,123,170	860	18,483,206
Investasi	9	636,719	13	1,157,397
Konsumtif dan lainnya	7,933	435,534,356	6,486	377,850,891
Jumlah	8,730	456,294,246	7,359	397,491,494

b. Kredit berdasarkan sektor ekonomi;

dalam ribuan rupiah

Jenis Penggunaan	Tahun 2022		Tahun 2021	
	NOA	Baki Debet	NOA	Baki Debet
Industri Pengolahan	1	8,617	4	43,117
Listrik, Gas dan Air	2	60,497	3	87,801
Konstruksi			1	48,611
Perdagangan Besar dan Eceran	695	3,626,893	732	4,176,024
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2	3,903	3	6,367
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2	7,714	-	-
Perantara Keuangan	1	2,107,286	6	13,578,897
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5	256,748	9	396,886
Jasa Pendidikan			3	45,159
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	143,883	3	216,628
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2	39,904	2	74,906
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	68	1,470,461	107	966,207
Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga	19	13,033,983	18	108,308
Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	7,931	435,534,356	6,468	377,742,583
Jumlah	8,730	456,294,246	7,359	397,491,493

c. Kredit berdasarkan kualitas kredit.

dalam ribuan rupiah

KUALITAS KREDIT	REALISASI		PERTUMBUHAN	
	Des-21	Des-22	NOMINAL	%
Lancar	355,296,269	413,739,418	58,443,149	16.45%
Dalam Perhatian Khusus	23,814,037	25,929,464	2,115,427	8.88%
Kurang Lancar	4,021,463	2,134,811	(1,886,652)	-46.91%
Diragukan	3,927,710	2,811,012	(1,116,698)	-28.43%
Macet	10,432,014	11,679,540	1,247,526	11.96%
NPL	18,381,187	16,625,363	(1,755,824)	-9.55%
Jumlah NPL	4.62%	3.64%		
JUMLAH	397,491,493	456,294,245	58,802,752	14.79%

2.4. Rekapitulasi asset tetap dan inventaris

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional bank, maka pada tahun 2022 terdapat penambahan asset dengan rincian sebagai berikut:

dalam ribuan rupiah

Inventaris	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Harga Perolehan	Nilai Buku	Harga Perolehan	Nilai Buku
Tanah	520,288	520,288	520,288	520,288
Bangunan	7,219,816	2,617,183	7,219,816	2,978,174
Peralatan dan Perlengkapan	3,660,879	930,066	3,258,609	891,084
Kendaraan	2,979,800	998,468	3,414,100	1,279,643
Aset Tetap Lainnya	2,789,890	451,473	2,679,905	532,821
Jumlah	17,170,673	5,517,479	17,092,718	6,202,010

2.5. Rincian asset tak berwujud

Pada Tahun 2022 terdapat asset tak berwujud berupa program aplikasi dengan harga perolehan sebesar Rp. 230.922 ribu dan nilai buku sebesar Rp.43.475 ribu.

2.6. Rincian asset lain-lain

Asset lain-lain terdiri dari pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, dan asset lainnya, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

RINCIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Pajak dibayar dimuka	-	-
Biaya dibayar dimuka	998,064	297,665
Lainnya	3,021,489	2,806,185
Jumlah	4,019,553	3,103,851

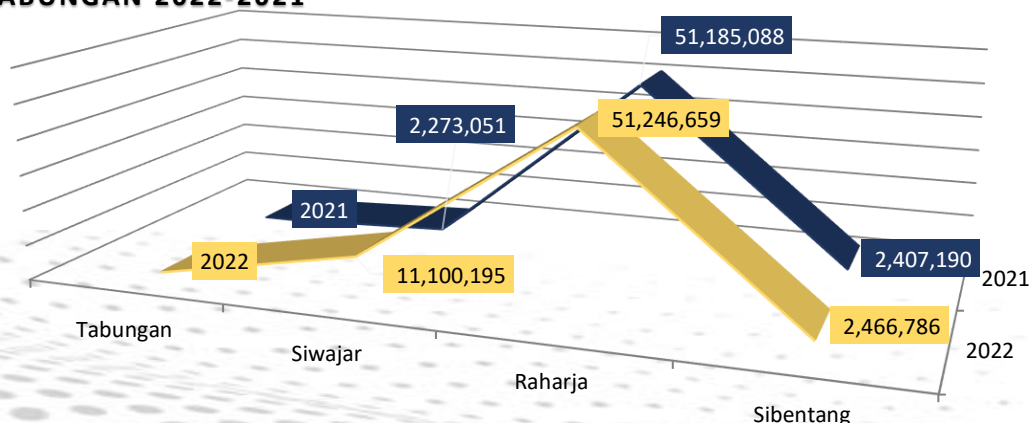
2.7. Rincian tabungan dan deposito

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diantaranya dilakukan dalam bentuk tabungan yang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 16,02% atau sebesar Rp8.948.311 ribu dari tahun sebelumnya sebesar Rp55.865.328 ribu menjadi sebesar Rp64.813.640 ribu, dengan jumlah penabung sebanyak 21.569 rekening.

dalam ribuan rupiah

Produk Tabungan	Tahun 2022		Tahun 2021	
	NOA	Nominal	NOA	Nominal
Siwajar	1,017	11,100,195	799	2,273,051
Raharja	19,926	51,246,659	16,046	51,185,088
Sibentang	626	2,466,786	497	2,407,190
Jumlah	21,569	64,813,640	17,342	55,865,328

TABUNGAN 2022-2021

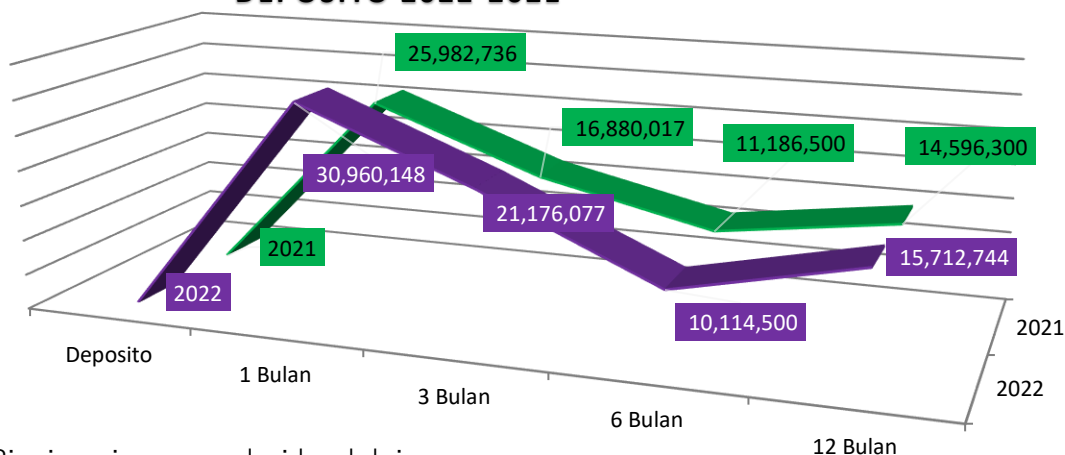


Penghimpunan dana lainnya juga dilakukan dalam bentuk Deposito berjangka yang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.9.317.917 ribu atau sebesar 13,57 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.645.553 ribu menjadi sebesar Rp.77.963.469 ribu, dengan jumlah depositan sebanyak 822 rekening atau mengalami peningkatan sebesar 18,27% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 695 rekening.

dalam ribuan rupiah

Produk Deposito	Tahun 2022		Tahun 2021	
	NOA	Nominal	NOA	Nominal
1 Bulan	117	30,960,148	125	25,982,736
3 Bulan	385	21,176,077	261	16,880,017
6 Bulan	120	10,114,500	93	11,186,500
12 Bulan	200	15,712,744	216	14,596,300
Jumlah	822	77,963,469	695	68,645,553

DEPOSITO 2022-2021



2.8. Rincian simpanan dari bank lain

Salah satu kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) yaitu dalam bentuk simpanan dari bank lain baik berupa deposito maupun tabungan. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan sebesar 9,50% atau sebesar Rp8.781.620 ribu dari sebesar Rp92.416.202 pada tahun 2021 menjadi Rp83.634.582 ribu pada tahun 2022. Adapun rincian simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

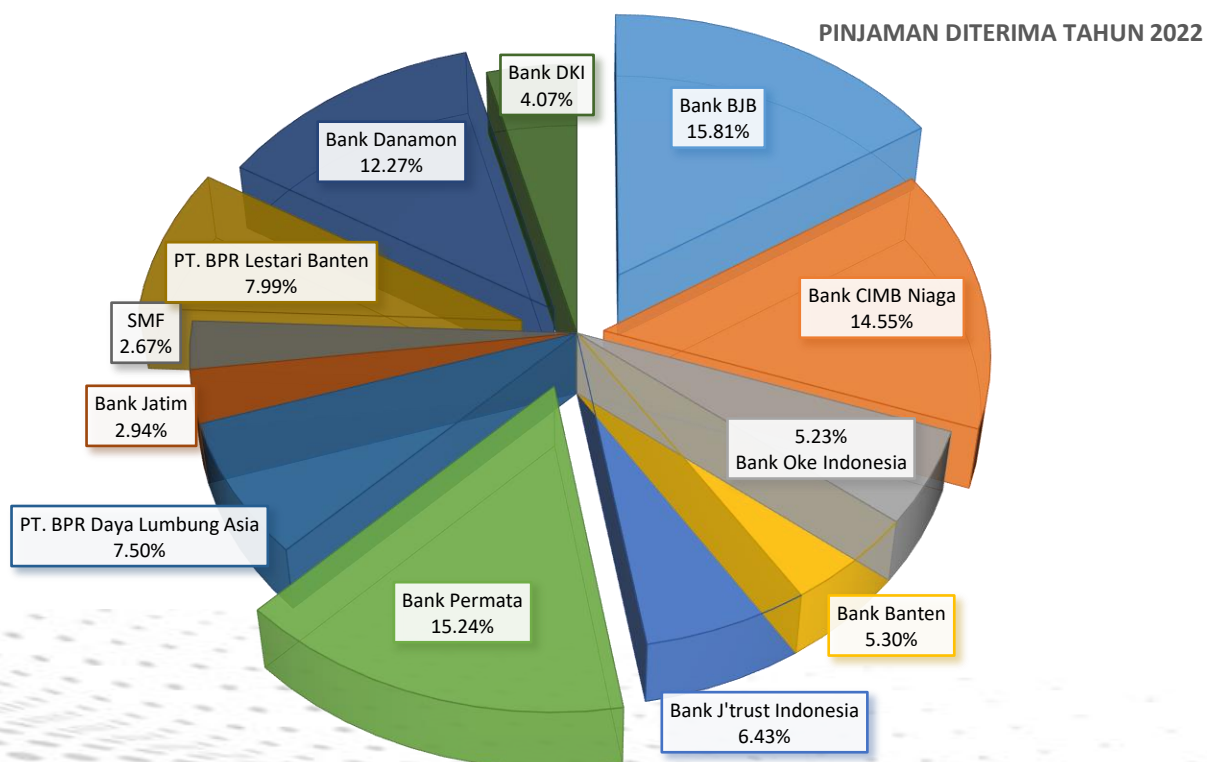
RINCIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Deposito	82,925,000	89,900,000
Tabungan	709,582	2,516,202
Jumlah	83,634,582	92,416,202

2.9. Rincian pinjaman yang diterima

Kegiatan penghimpunan dana lainnya juga dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa Bank umum dan BPR dalam bentuk pinjaman yang sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai sebesar Rp241.961.367 ribu dari 10 (Sepuluh) Bank umum dan 2 (Dua) BPR, dengan rincian sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

PINJ. YG DITERIMA	TAHUN 2021	KOMPOSISI %	TAHUN 2022	KOMPOSISI %
Bank BJB	2,591,506	1.30%	38,250,000	15.81%
Bank CIMB Niaga	75,733,334	37.94%	35,200,000	14.55%
Bank Oke Indonesia	28,333,333	14.19%	12,666,667	5.23%
Bank Banten	18,233,333	9.13%	12,833,333	5.30%
Bank J'trust Indonesia	22,731,623	11.39%	15,551,063	6.43%
Bank Permata	49,375,000	24.73%	36,875,000	15.24%
PT. BPR Daya Lumbung Asia	2,639,200	1.32%	18,142,190	7.50%
Bank Jatim	-	0.00%	7,125,000	2.94%
SMF	-	0.00%	6,459,256	2.67%
PT. BPR Lestari Banten	-	0.00%	19,330,258	7.99%
Bank Danamon	-	0.00%	29,688,600	12.27%
Bank DKI	-	0.00%	9,840,000	4.07%
JUMLAH	199,637,329	100.00%	241,961,367	100.00%



2.10. Rincian kewajiban lain-lain

Kewajiban lain-lain terdiri dari biaya tenaga kerja, dana kesejahteraan, dan dana pembinaan dengan rincian sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

RINCIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Biaya Tenaga Kerja	3,237	3,237
Dana Kesejahteraan		79,036
Dana Pembinaan	243,067	
Jumlah	246,304	82,272

2.11. Rincian Pendapatan

Total Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.024.476 ribu atau sebesar 8,30%, yaitu dari sebesar Rp84.593.551 ribu pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp91.618.027 ribu pada tahun 2022.

Hal tersebut secara umum terkait dengan perbaikan kualitas kredit dan peningkatan aktiva produktif terutama kredit yang diberikan yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional berupa pendapatan bunga yang mengalami kenaikan sebesar 0,46% atau sebesar Rp378.051 ribu dari Rp81.700.978 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp82.079.029 ribu pada tahun 2022 dan pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar 234% atau sebesar Rp6.317.427 ribu dari Rp2.699.724 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp9.017.151 ribu pada tahun 2022.

dalam ribuan rupiah

PENDAPATAN	Des-21	Des-22	MUTASI	
			NOMINAL	%
Pendapatan Bunga	81,700,978	82,079,029	378,051	0.46%
Pendapatan Operasional Lainnya	2,699,724	9,017,151	6,317,427	234.00%
Pendapatan non Operasional	192,849	521,847	328,998	170.60%
JUMLAH PENDAPATAN	84,593,551	91,618,027	7,024,476	8.30%

2.12. Rincian Beban

Beban Bank mengalami kenaikan sebesar 6,07% atau sebesar Rp4.540.828 ribu dari sebesar Rp74.842.707 ribu pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp79.383.535 ribu pada tahun 2022. Dengan rincian biaya bunga mengalami kenaikan sebesar 2,16%, atau sebesar Rp680.145 ribu.

Biaya PPAP mengalami kenaikan sebesar Rp1.814.530 atau sebesar 40,80%,

biaya pemasaran mengalami kenaikan 142,11% atau sebesar Rp451.493 ribu dari Rp317.718 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp769.212 ribu pada tahun 2022. Biaya administrasi dan umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,29% atau sebesar Rp1.520.086 ribu dari Rp35.443.446 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp36.963.532 ribu pada tahun 2022.

dalam ribuan rupiah

BEBAN	Des-21	Des-22	MUTASI	
			NOMINAL	%
Beban Bunga	31,538,602	32,218,746	680,145	2.16%
Beban PPAP	4,447,737	6,262,267	1,814,530	40.80%
Beban Pemasaran	317,718	769,212	451,493	142.11%
Beban Administrasi&Umum	35,443,446	36,963,532	1,520,086	4.29%
Beban Operasional Lainnya	2,586,531	2,721,976	135,445	5.24%
Beban non Operasional	508,673	447,802	(60,871)	-11.97%
JUMLAH BEBAN	74,842,707	79,383,535	4,540,828	6.07%

2.13. Laba Usaha

Laba sebelum pajak dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan Rp2.483.648 ribu atau sebesar 25,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.750.844 ribu menjadi sebesar Rp12.234.492 ribu dan laba setelah pajak naik sebesar Rp1.937.245 ribu dari sebesar Rp7.605.659 ribu pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp9.542.904 ribu pada tahun 2022.

dalam ribuan rupiah

LABA USAHA	Des-21	Des-22	MUTASI	
			NOMINAL	%
Laba Sebelum Pajak	9,750,844	12,234,492	2,483,648	25.47%
Pajak Penghasilan	2,145,185	2,691,588	546,403	25.47%
LABA SETELAH PAJAK	7,605,659	9,542,904	1,937,245	25.47%

2.14. Transaksi hubungan istimewa

Berdasarkan POJK No.23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, bahwa pihak terkait dengan BPR meliputi :

1. Perusahaan/Perorangan yang merupakan pengendali BPR secara langsung atau tidak langsung :
 - a. Memiliki 10% lebih saham BPR secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. Melakukan Tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (dengan/tanpa perjanjian tertulis) dan/atau memiliki 10% lebih saham BPR;

- c. Memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR;
 - d. Memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategi BPR.
- 2. Anggota Direksi;
 - 3. Anggota Dewan Komisaris;
 - 4. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari :
 - a. Perorangan yang merupakan pengendali BPR pada angka 1;
 - b. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada BPR pada angka 2 dan/atau angka 3.
 - 5. Pejabat eksekutif;
 - 6. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 5 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan;
 - 7. BPR lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR lain tersebut;
 - 8. BPR lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai Komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Direksi dan Komisaris pada BPR lain;
 - 9. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR; dan
 - 10. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9.
- 2.15. Rincian transaksi hubungan istimewa
- 2.15.1. Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban, meliputi :
- Rincian kredit yang diberikan kepada pihak terkait;

dalam ribuan rupiah

NAMA	KREDIT YANG DIBERIKAN		% ASET	HUBUNGAN KETERKAITAN
	PLAFOND	SALDO		
Total Aset BPR			577,885,946	
Bangbang Purnawan	150,000	68,750	0.01%	Komisaris
Ai Suherlan	225,000	187,500	0.03%	Direksi
Deni Setia Wahyudi	300,000	300,000	0.05%	Direksi
Denny Kristiyanto DN	610,000	556,626	0.10%	Pejabat Eksekutif
Ahmad Firdaus	200,000	66,667	0.01%	Pejabat Eksekutif
Natalia Tri Rahayu	200,000	179,167	0.03%	Pejabat Eksekutif
Ashadi Ruswandi	330,000	319,000	0.06%	Pejabat Eksekutif
Abdul Ghani	350,000	245,001	0.04%	Pejabat Eksekutif
Rochaidin	200,000	183,333	0.03%	Pejabat Eksekutif

2.15.2. Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

a. Sifat hubungan :

dalam ribuan rupiah

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN MODAL DI BPR		HUBUNGAN KETERKAITAN		
	Rp.	%	Nama/ Badan Hukum	Sifat Hubungan	%
Pemkab. Tangerang	198,350,000	79.34%	PT. LKM Artha Kerta Raharja	Keuangan	76.00%
			PD. Pasar Niaga Kerta Raharja	Keuangan	100.00%
Pemprov. Banten	50,000,000	20.00%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	33.01%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	2.35%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	5.84%
			4. PT. Jamkrida Banten	Keuangan	90.03%
Pemprov. Jawa Barat	600,000	0.24%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	7.59%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	1.18%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	2.63%
PT. Bank BJB	1,050,000	0.42%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	5.00%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	1.00%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	3.00%
Komisaris					
1. Drs. Yusuf Herawan	-	0,00%			
2. Bangbang Purnawan	-	0,00%	PT. BPR Hariarta Sedana	Komisaris	
3. Beni Subarsyah	-	0,00%		Komisaris	
Direksi :					
1. Ai Suherlan	-	0,00%	-		-
2. Uus Mustaudie	-	0,00%	-		-
3. Deni Setia Wahyudi	-	0,00%	-		-

- b. Jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa :
 1. Penempatan dalam bentuk tabungan;
 2. Penempatan dalam bentuk deposito;
 3. Pemberian kredit;
 4. Penerimaan simpanan dalam bentuk tabungan;
 5. Penerimaan simpanan dalam bentuk deposito;
 6. Penjaminan kredit.
- c. Kebijakan persyaratan transaksi hubungan istimewa :
 1. Persyaratan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diperlakukan sama dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPR;
 2. Pemberian suku bunga yang lebih rendah kepada Pengurus dan Pegawai dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
 3. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif terhadap pihak yang terkait dengan BPR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rasio Keuangan

Ditinjau dari rasio keuangan, beberapa parameter rasio mencatat mengalami sedikit kenaikan maupun penurunan. *Non Performing Loan* (NPL) nett turun sebesar 0,05% yaitu dari 1,72% pada tahun 2021 menjadi 1,67% di tahun 2022, LDR mengalami kenaikan sebesar 3,33%, ROA naik sebesar 0,32% serta ROE tahun 2022 naik sebesar 1,28%. Pencapaian rasio-rasio secara keseluruhan masih dalam level rasio yang sehat.

RASIO-RASIO KEUANGAN		
	2022	2021
KPMM Tier 1	24.06%	22.82%
KPMM Tier 2	23.83%	22.42%
KAP	2.55%	2.93%
NLP Gross	1.80%	4.62%
NPL Netto	3.64%	1.72%
ROA	2.22%	1.90%
ROE	9.26%	7.56%
NIM	9.70%	9.54%
BOPO	86.65%	89.73%

RASIO-RASIO KEUANGAN

	2022	2021
Cash Ratio	63.29%	75.36%
LDR	86.12%	82.70%

1. Persentase Pelanggaran BMPK

a. Pihak Terkait	-	-
b. Pihak Tidak Terkait	-	-

2. Persentase Pelampauan BMPK

a. Pihak Terkait	-	-
b. Pihak Tidak Terkait	-	-

4. Komitmen dan kontinjensi

3.1. Pengungkapan Komitmen

Tidak terdapat kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang kepada pihak lain dan/atau pihak yang terkait;

3.2. Pengungkapan Kontinjensi

- a. Tidak terdapat perkara atau sengketa hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang; dan
- b. Tidak terdapat kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, dan denda.

(dinyatakan dalam rupiah)

No.	Rekening Administratif	31-Des-22	31-Des-21
1	Tagihan Komitmen		
	a. Fasilitas Pinjaman yang diterima yang belum ditarik	58,557,476,483	
	b. Tagihan Komitmen Lainnya		
2	Kewajiban Komitmen		
3	a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	6,740,127,699	5,174,000,000
	b. Penerusan kredit (channeling)		
	c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
4	Tagihan Kontinjensi	17,362,313,312	15,788,562,202
	a. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4,504,937,962	4,524,670,592
	b. Aset produktif yang dihapusbukukan	12,857,375,350	11,263,891,610
	c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit		
	d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
5	Kewajiban Kontinjensi		
6	Rekening Administratif Lainnya		
Total		12,857,375,350	11,263,891,610

5. Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017, bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).

Bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah menerapkan standar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR sejak periode laporan yang berakhir per 31 Desember 2013, maka peraturan baru tersebut pada periode laporan tidak mempengaruhi aktivitas dan estimasi keuangan BPR.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Bagian Keempat
Surat Komentor
(Management Letter)



INTEGRITAS

Mengedepankan kewibawaan,
kejujuran dan kepercayaan
untuk mencapai visi misi
perusahaan

KONSISTEN

Tetap konsisten dalam
menjalankan visi misi untuk
mencapai tujuan dan cita-cita
perusahaan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)**

MANAGEMENT LETTER
ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

Nomor : ML-013/JSR-BGR/III/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : *Management Letter*

Kepada Yth.

PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Jl. Raya Serang KM 15 No.1 Cikupa Kabupaten Tangerang – Banten

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) ("Perusahaan") untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta telah mengeluarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00013/3.0410/AU.2/07/1624-1/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Sebagai bagian dari audit tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern Perusahaan, seperti yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern Perusahaan ini, bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap pengendalian intern Perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami. Keadaan administrasi serta pengendalian intern Perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama audit berlangsung kami menemukan kelemahan yang perlu mendapat perhatian pengurus untuk perbaikan selanjutnya.

Management Letter ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen Perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak luar Perusahaan, untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan seluruh staf Perusahaan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit.

Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen terlampir.



Danang Rahmat Surono, CPA
No.Reg.Izin AP.1624

6 Maret 2023

Branch Office I Bogor
License Number : 567/KM.1/2019 dated October 14, 2019
Kota Wisata, Ruko Maison Avenue MA 12, Cileungsi, Kab. Bogor 16820. Jawa Barat
www.kapjsr.co.id

Jakarta | Bogor | Bekasi | Bandung | Pekanbaru

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN MANAJEMEN:

1. Pengawasan / Monitoring atas 2 (dua) debitur kurang optimal

Dari hasil pemeriksaan 25 (dua puluh lima) besar berkas debitur, terdapat 2 (dua) debitur dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
 - No SPK : 1B001091
 - Alamat : Ruko Park View Blok Y 02 No. 10-11 Tangerang
 - Plafond : Rp15.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 3 (Tiga) tahun
- b. PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang
 - No SPK : 1B011090
 - Alamat : Jl. Mayor Widogdo, Kabayan, Pandeglang
 - Plafond : Rp 3.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 3 (Tiga) tahun

Terdapat hal sebagai berikut :

- Dalam Berkas tidak ditemukan Laporan Keuangan Bulanan sejak bulan Januari 2022 s/d Bulan Desember 2022 atau setidaknya laporan bulan-bulan Maret 2022, Juni 2022, September 2022, Desember 2022;
- Laporan Monitoring Oleh Tim dari PT BPR Kerta Raharja Gemilang hanya 1 (satu) kali.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu persyaratan yang dicantumkan dalam SPK masing-masing, yaitu, Bahwa :

- Debitur harus menyampaikan laporan keuangan bulanan atau minimal 3 (tiga) bulan sekali, sejak penandatanganan kredit, selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal laporan dimaksud
- Debitur harus mengizinkan pihak PT BPR KRG melakukan monitoring (rekonsiliasi) terhadap agunan piutang secara periodek, minimal 3 (tiga) bulan sekali

Hal ini terjadi karena pihak debitur kurang memahami ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam SPK. Selain itu, PT BPR KRG (PERSERODA) kurang tegas dalam menerapkan ketentuan/ persyaratan tersebut.

Akibat tidak diterimanya laporan keuangan bulanan atau triwulanan dan monitoring hanya dilakukan sekali dalam setahun maka pengawasan yang dilakukan PT BPR KRG belum optimal.

Rekomendasi

Untuk selanjutnya apabila pihak debitur tidak menyampaikan laporan bulanan/triwulanan maka PT BPR KRG (PERSERODA) Supaya mengingatkan kepada debitur yang bersangkutan secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK , monitoring supaya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Tanggapan Manajemen BPR:

Akan ditindaklanjuti.

Branch Office | Bogor
License Number : 567/KM.1/2019 dated October 14, 2019
Kota Wisata, Ruko Maison Avenue MA 12, Cileungsi, Kab. Bogor 16820. Jawa Barat
www.kapjsr.co.id

Jakarta | Bogor | Bekasi | Bandung | Pekanbaru

2. Tanah dan Gedung

Salah satu aset yang dimiliki oleh PT BPR KRG (PERSERODA) Tangerang adalah tanah dan gedung kantor yang berlokasi di Jl. Serang KM.15 No. 1, Cikupa Kab. Tangerang. Bukti Kepemilikan yang ada adalah :

1. SHGB Nomor 00479 tanggal 14 Oktober 2008 dengan tanah 568 m²
2. SPPT / PBB tahun 2020 yang diterbitkan oleh kepala dinas pendapatan Kab. Tangerang, yang mencantumkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan Nama Pemilik "Atung".

Dari hasil pemeriksaan atas bukti kepemilikan tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. SHGB nomor 00479 tanggal 14 Oktober 2008, nama pemiliknya adalah : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tanggal 01 Oktober 2019, Tentang perubahan bentuk hukum perusahaan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Terbatas (PT) maka nama pemilik harus dirubah menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
- b. SPPT/PBB tahun 2020, yang mencantumkan luas tanah 540 m², tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam SHGB nomor 00479/2008 dan AJB No 671/2009 seluas 568 m² dan luas Gedung 54 m² tidak cocok dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan nama pemilik objek Pajak masih atas nama "Atung".

Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas direkomendasikan kepada manajemen BPR agar:

1. Melakukan perubahan nama pemilik dalam SHGB Nomor 00479/2008 dari PD BPR Kerta Raharja, menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
2. Segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dengan melampirkan data yang benar agar data yang tercantum dalam SPPT/PBB sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu tentang luas tanah, luas bangunan dan nama pemilik.

Tanggapan Manajemen BPR:

1. Akan melakukan perubahan nama pemilik dalam SHGB Nomor 00479/2008 dari PD BPR Kerta Raharja, menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda);
2. Akan segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang untuk melakukan pencantuman data dan keadaan yang sebenarnya dalam SPPT/PBB, berkaitan dengan :
 - a. luas tanah;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nama pemilik.

Tangerang, Maret 2023

Direksi

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)


Aji Suherlan
Direktur Utama


Uus Mustaudie
Direktur Operasional


Deni Setia Wahyudi
Direktur SDM, Umum&Kepatuhan

